

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI SUMATERA BARAT 2017



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI SUMATERA BARAT 2017



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI SUMATERA BARAT 2017

ISSN : 2477-1023

No. Publikasi : 13550.1807

Nomor Katalog : 4102004.13

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : xvi + 76 halaman

Naskah :

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting :

Bidang Integrasi dan Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Gambar Kulit :

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh :

© Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Dicetak Oleh :

CV Graphic Dwipa (cetakan : I)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 43 huruf b)

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI SUMATERA BARAT 2017

- Pengarah /*Director* : Dr. Ir. Sukardi, M.Si
- Editor/*Editors* : Hefinanur, SE, ME
Ichsan, S.ST
Lidya Sriyeni, S.ST, M.Si
Deswaty, S.ST
- Penulis/*Writers* : Nilham, SE
Dr. Rita Diana S.Si. M.Si
Nurwinda Anggun Primahartati, S.ST
M. Kanzu Satrio, S.ST
Sedwina Ridena, S.ST
- Pengolahan Data/*Data Processing* : Nilham, SE
Sedwina Ridena, S.ST
M. Kanzu Satrio, S.ST
- Penyiapan Draft/*Draft Preparation* : Nilham,SE
- Kontributor Data : Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat - BPS Sumatera Barat
Seksi Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan - BPS Sumatera Barat
Seksi Ketahanan Sosial - BPS Sumatera Barat

KATA PENGANTAR

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI SUMATERA BARAT 2017 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Sumatera Barat antar waktu dan perbandingannya antar daerah tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan). Data yang digunakan bersumber dari BPS dan dari Dinas Instansi di Sumatera Barat. Data BPS bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Diharapkan publikasi ini bermanfaat, kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Padang, November 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Barat



Dr. Ir. Sukardi, M.Si

DAFTAR ISI / CONTENTS

	Halaman Page
Kata Pengantar	v
Datar Isi	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xii
Singkatan dan Akronim	xvi
Bab I. KEPENDUDUKAN.....	1
1.1. JUMLAH DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK SERTA RASIO JENIS KELAMIN	3
1.2. PERSEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK	4
1.3. ANGKA BEBAN KETERGANTUNGAN	5
1.4. FERTILITAS.....	6
1.5. WANITA MENURUT USIA PERKAWINAN PERTAMA.....	7
1.6. PENGGUNAAN ALAT/ CARA KB.	8
Bab II. KESEHATAN DAN GIZI.....	11
2.1. DERAJAT DAN STATUS KESEHATAN PENDUDUK.....	13
2.2. PEMBERIAN ASI DAN IMUNISASI	16
2.3. PEMANFAATAN FASILITAS TENAGA KESEHATAN.....	18
Bab III. PENDIDIKAN.....	21
3.1. ANGKA MELEK HURUF	23
3.2. RATA - RATA LAMA SEKOLAH.....	24
3.3. TINGKAT PENDIDIKAN.....	25
3.4. TINGKAT PARTISIPASI SEKOLAH.....	26
Bab IV. KETENAGAKERJAAN	31
4.1. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) DAN TINGKAT PENGANGGURAN (TPT)	33
4.2. TINGKAT PENGANGGURAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN	34
4.3. LAPANGAN USAHA DAN STATUS PEKERJAAN.....	35
4.4. JUMLAH JAM KERJA	36
4.5. UPAH/GAJI/PENDAPATAN BERSIH KERJA	38
Bab V. TARAF DAN POLA KONSUMSI.....	41
5.1. PENGELUARAN RUMAH TANGGA	43
5.2. DISTRIBUSI PENDAPATAN.....	46
5.3. KONSUMSI ENERGI DAN PROTEIN	47
Bab VI. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN.....	49
6.1. KUALITAS RUMAH TINGGAL.....	51
6.2. FASILITAS RUMAH TINGGAL.....	52
6.3. STATUS KEPEMILIKAN RUMAH.....	54
Bab VII. KEMISKINAN.....	55
7.1. JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN	57

7.2. PERKEMBANGAN PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI SUMATERA BARAT MENURUT KABUPATEN/KOTA	58
7.3. GARIS KEMISKINAN (GK) INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2).....	59
7.4. KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA MISKIN DI PROVINSI SUMATERA BARAT	60
Bab VIII. SOSIAL LAINNYA	65
8.1. AKSES PADA TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI	67
8.2. TINDAK KEJAHATAN.....	68
Istilah Teknis	71
Sumber Data.....	75

<https://sumbar.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Halaman

1.1	Jumlah Dan Laju Pertumbuhan Penduduk serta Ratio Jenis Kelamin di provinsi Sumatera Barat 2010 - 2017	4
1.2	Persentase penduduk Perkotaan dan Kepadatan Penduduk Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat 2010-2017.....	4
1.3	Komposisi Penduduk (%) dan Angka Ketergantungan Penduduk Sumatera Barat 2015 - 2017	5
1.4	Perkembangan ASFR Sumatera Barat, 1971 - 2010.....	6
1.5	Perkembangan TFR, GRR, NRR, CBR, dan Jumlah Kelahiran di Sumatera Barat, 2010 -2015	6
1.6	Persentase Wanita Umur 10+ Tahun Pernah Kawin menurut Usia Perkawinan Pertama di Sumatera Barat , 2016 dan 2017	8
1.7	Persentase Wanita Berusia 15-49 tahun dan Berstatus Kawin Tahun menurut alat/Cara KB yang sedang Digunakan di Sumatera Barat Tahun 2016-2017.....	9
2.1	Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita Sumatera Barat (per 1000 Kelahiran) 1994 - 2012.....	13
2.2	Perkembangan Angka Harapan Hidup (Eo), IMR, CDR dan Jumlah Kematian, Sumatera Barat tahun 2012 - 2017	14
2.3	Angka Kesakitan dan Rata-rata Lamanya Sakit Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2016-2017.....	15
2.4	Persentase Anak Usia 24 - 59 bulan yang Pernah Disusui dan Lamanya Disusui di Sumatera Barat Tahun 2016 dan 2017	16
2.5	Persentase Anak Umur 12 -59 Bulan yang pernah Diimunisasi di Sumatera Barat Menurut Jenis Imunisasi, 2016 dan 2017	17
2.6	Persentase Perempuan berumur 15-49 tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Sumatera Barat tahun 2016 dan 2017	18
2.7	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat Di Sumatera Barat, 2016 - 2017	19
2.8	Persentase Penduduk yang berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2017	20
2.9	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Daerah dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat tahun 2017	20
3.1	Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur, Jenis kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat , 2016 dan 2017.....	24
3.2	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Umur 25 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2016 dan 2017.....	25
3.3	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2016 dan 2017	26
3.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2016 dan 2017	27
3.5	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2016 dan 2017	28
3.6	Perkembangan Rasio Murid-Guru, Guru-Sekolah dan Rasio Murid-Kelas, 2013/2014-2016/2017 di Sumatera Barat	29

4.1	TPAK dan TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2016-2017	33
4.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2016-2017.....	34
4.3	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Kelompok Lapangan Pekerjaan Utama dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2016-2017.....	35
4.4	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2016-2017.....	36
4.5	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja Dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2016-2017.....	37
4.6	Tingkat Setengah Pengangguran (TSP) Menurut Kelompok Umur di Sumatera Barat Tahun 2016-2017.....	38
4.7	Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih Sebulan (rupiah) pekerja ¹⁾ Menurut Pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2016-2017	39
4.8	Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih Sebulan (rupiah) pekerja ¹⁾ Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2016-2017.....	39
4.9	Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih Sebulan (rupiah) pekerja ¹⁾ Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2016-2017	40
5.1	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran dan Tipe Daerah di Sumatera Barat Tahun 2016-2017 (Rupiah).....	43
5.2	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Barang di Sumatera Barat Tahun 2016-2017.....	44
5.3	Rata-Rata Pengeluaran untuk Makanan per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Pengeluaran dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2016 dan 2017 (Rupiah).....	45
5.4	Rata-Rata Pengeluaran untuk Non Makanan per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Pengeluaran dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2016 dan 2017 (Rupiah).....	45
5.5	Distribusi Pengeluaran Penduduk Perkapita dan Indeks Gini di Sumatera Barat Tahun 2015-2017	46
5.6	Jumlah Konsumsi Kalori dan Konsumsi Protein per Jenis Komoditi di Sumatera Barat Tahun 2016-2017.....	47
6.1	Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Rumah dan Tempat Tinggal menurut Jenis Wilayah di Sumatera Barat Tahun 2016 dan 2017	52
6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2016 dan 2017.....	52
6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Indikator Rumah Tangga Kumuh dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2016 dan 2017.....	53
6.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan dan Daerah Tempat Tinggal Di Sumatera Barat Tahun 2016 dan 2017.....	54
7.1	Perkembangan Penduduk Miskin di Sumatera Barat Tahun 2011-2017.....	58
7.2	Perkembangan Penduduk Miskin di Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2017.....	59
7.3	Garis Kemiskinan , Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2014-2017.....	60

7.4	Beberapa Karakteristik Demografi Rumah Tangga Miskin di Sumatera Barat, 2015-2017.....	61
7.5	Karakteristik Pendidikan Rumah Tangga Miskin di Sumatera Barat, 2015-2017.....	62
7.6	Karakteristik Ketenagakerjaan Rumah Tangga di Sumatera Barat, 2015-2017.....	62
7.7	Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Karakteristik Perumahan di Sumatera Barat , 2015-2017	63
8.1	Persentase Penduduk Melakukan Perjalanan di Sumatera Barat Menurut Jenis Kelamin, 2016 - 2017	67
8.2	Persentase Penduduk Sumatera Barat yang Melakukan Perjalanan dalam Kurun Waktu 6 Bulan Terakhir Menurut Tujuan dan Jenis Kelamin Tahun 2016.....	67
8.4	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet (termasuk <i>Facebook, Twiter, BBM,Whatsapp</i>) Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Tujuan Mengakses Internet dan Jenis Kelamin Tahun 2017	68
8.5	Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan di Sumatera Barat, 2017-2018.....	69

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1.1	Tingkat Pertumbuhan Penduduk Sumatera Barat 2014 -2017.....	3
1.2	Angka Beban Ketergantungan Penduduk Sumatera Barat , 2015 - 2017	5
1.3	Persentase Wanita Usia 10+ Tahun Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama 2016 - 2017.....	7
1.4	Persentase Wanita Usia 15 - 49 tahun yang berstatus Kawin Menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB di Sumatera Barat Tahun 2016-2017.....	8
2.1	Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita di Sumatera Barat Tahun 2007 dan 2012	13
2.2	Angka Harapan Hidup (tahun) Menurut Jenis Kelamin di Sumatera Barat 2016-2017	14
2.3	Angka Kesakitan (%) di Sumatera barat Tahun 2016-2017.....	15
2.4	Tingkat Imunisasi Campak di Sumatera Barat Tahun 2016- 2017	17
2.5	Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan di Sumatera Barat tahun 2017	18
3.1	Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin (persen) di Sumatera Barat Tahun 2016 dan 2017.....	24
4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Sumatera Barat tahun 2016 dan 2017	33
4.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Barat tahun 2016 dan 2017	34
4.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Dengan Pendidikan Minimal SMA di Sumatera Barat Tahun 2016 dan 2017	35
4.4	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (persen) di Sumatera Barat 2017	36
4.5	Persentase Penduduk yang Bekerja Kurang dari 35 Jam Seminggu di Sumatera Barat Tahun 2016 dan 2017	37
5.1	Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran dan Tipe Daerah di Sumatera Barat Tahun 2016 dan 2017.....	43
5.2	Rata-Rata Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Perkapita Sebulan Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2017	44
5.3	Distribusi Pengeluaran Penduduk dan Indeks Gini di Sumatera Barat Tahun 2016-2017	46
5.4	Konsumsi Energi Per Kapita per Hari Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat, 2016-2017	47
5.5	Konsumsi Protein Per Kapita per Hari Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat, 2016-2017	48
6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai perkapita (m ²) di Sumatera Barat Tahun 2016-2017	51
6.2	Persentase Rumah Tangga Kumuh Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2016 dan 2017	53
6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Status kepemilikan di Sumatera Barat Tahun 2017.....	54

7.1	Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Barat Tahun 2011-2017,.....	58
7.2a	Persentase Kepala Rumahtangga Miskin Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan di Sumatera Barat, 2017	61
7.2b	Persentase Kepala Rumahtangga Tidak miskin Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan di Sumatera Barat, 2017	61
8.1	Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan “Wisata” di Sumatera Barat menurut Jenis Kelamin 2017	67

<https://sumbar.bps.go.id>

SINGKATAN DAN AKRONIM / *ABBREVIATION AND ACRONYMS*

AKB	Angka Kematian Bayi
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASI	Air Susu Ibu
<i>ASFR</i>	<i>Age specifik Fertility Rate</i>
BPS	Badan Pusat Statistik
KB	Keluarga Berencana
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SDKI	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
<i>CBR</i>	<i>Crude Birth Rate</i>
SD/PS	Sekolah Dasar
SM/SHS	Sekolah Menengah
SMP/JHS	Sekolah Menengah Pertama
SP	Sensus Penduduk
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TFR	<i>Total Fertility Rate</i>
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
<i>GRR</i>	<i>Gross Reproductive Rate</i>
<i>NRR</i>	<i>Net Reproductive Rate</i>
BKKBN	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
<i>SDGs</i>	<i>Sustainable Development Goals</i>
AKABA	Angka Kematian Balita
<i>CDR</i>	<i>Crude Death Rate</i>
<i>IMR</i>	<i>Infant Mortality Rate</i>
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

UKBM	Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
AMH	Angka Melek Huruf
APK	Angka Partisipasi Kasar
UNDP	<i>United Nations Development Programme</i>
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
TSP	Tingkat Setengah Pengangguran
GK	Garis Kemiskinan
ART	Anggota Rumah Tangga
KRT	Kepala Rumah Tangga

<https://sumbar.bps.go.id>



BAB

1

KEPENDUDUKAN

<https://sumbar.bps.go.id>

1. KEPENDUDUKAN

Isu kependudukan yang sering dibicarakan akhir-akhir ini adalah tentang bonus demografi. Bonus demografi dimana keadaan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari penduduk usia non produktif (usia kurang dari 15 tahun dan usia 65 tahun keatas) atau bonus demografi terjadi apabila angka beban tanggungan dibawah 50 artinya keadaan dimana jumlah penduduk usia produktif 2 kali lipat atau lebih dari jumlah penduduk non produktif.

Pada saat itu jelas penduduk usia produktif jauh lebih banyak dari pada penduduk yang tidak produktif dan sekarang kita akan menuju era tersebut. Kondisi ini hanya terjadi sekali dalam rentang siklus kehidupan suatu bangsa dan sangat ditunggu-tunggu untuk dapat dijadikan momentum untuk mencapai pembangunan lebih cepat lagi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

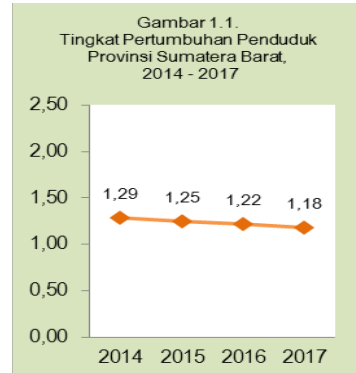
Hasil Supas 2015 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 angka beban tanggungan penduduk Provinsi Sumatera Barat sebesar 55. Menurut hasil proyeksi penduduk Supas 2015 Sumatera Barat baru akan memasuki era bonus demografi setelah tahun 2035. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci untuk meraih peluang bonus demografi untuk benar-benar meningkatkan pembangunan secara signifikan, tetapi kalau tidak diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia maka jumlah penduduk usia produktif yang banyak hanya akan menjadi beban dalam proses pembangunan

Disamping itu cepat atau lambatnya suatu daerah mencapai era bonus demografi sangat ditentukan juga oleh laju pertumbuhan penduduk, terutama laju pertumbuhan penduduk usia muda.

1.1 JUMLAH DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK SERTA RASIO JENIS KELAMIN

Dari hasil penghitungan proyeksi penduduk menunjukkan jumlah penduduk Sumatera Barat tahun 2017 mencapai 5,32 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut meningkat sebesar 1,18 persen dari tahun 2016 yang berjumlah 5,26 juta jiwa.

Semakin besar jumlah penduduk, Provinsi Sumatera Barat dihadapkan pada masalah kependudukan yang cukup kompleks. Oleh sebab itu, upaya penurunan laju pertumbuhan penduduk disertai peningkatan kualitas dan kesejahteraan penduduk merupakan program pembangunan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan.



Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2020

Jumlah penduduk Sumatera Barat terus bertambah hingga mencapai 5,32 juta jiwa tahun 2017. Dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Sumatera Barat telah bertambah sekitar 456 ribu orang atau meningkat 9,38 persen selama enam tahun terakhir.

Tabel 1.1 Jumlah dan Laju Petumbuhan Penduduk serta Rasio Jenis kelamin Provins Sumatera Barat 2010-2017

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	4 865,3	1,34*)	98,09
2011	4 933,1	1,39	98,29
2012	5 000,2	1,36	98,48
2013	5 066,5	1,33	98,65
2014	5 131,9	1,29	98,80
2015	5 196,3	1,25	98,93
2016	5 259,5	1,22	99,05
2017	5 321,5	1,18	99,17

Catatan : *) Rata-rata laju pertumbuhan penduduk 2000 - 2010

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat angkanya terus menunjukkan penurunan. Selama periode 2000-2010 secara rata-rata laju pertumbuhan penduduknya mencapai 1,34 persen pertahun. Kemudian dari tahun 2010 ke tahun 2011 laju pertumbuhan masih cukup tinggi yaitu sebesar 1,39 persen. Selanjutnya laju pertumbuhan penduduk terus menunjukkan penurunan hingga mencapai 1,18 persen dari tahun 2016 ke 2017. Penurunan jumlah penduduk memberikan gambaran bahwa program pemerintah untuk menghambat laju pertumbuhan penduduk telah berhasil terutama dalam menekan jumlah kelahiran.

Komposisi penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan kecil dari seratus. Sumatera Barat dikenal dengan ciri demografi dimana jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki, hal ini ditandai rasio jenis kelamin dibawah seratus.

Namun perkembangan beberapa tahun terakhir rasio jenis kelamin terus meningkat seiring bertambahnya proporsi jumlah penduduk laki-laki hingga tahun 2017 sudah mencapai 99,17, artinya pada setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 99 orang

penduduk laki-laki.

1.2 PERSEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK

Salah satu persoalan terkait dengan masalah kependudukan adalah ketimpangan distribusi penduduk antar daerah kabupaten dan kota dan antara penduduk perdesaan dan perkotaan. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah dan tekanan penduduk disuatu daerah. Beberapa daerah kota penduduknya semakin besar sementara itu beberapa daerah kabupaten masih dihuni oleh penduduk yang relatif sedikit. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat setempat.

Diwilayah penduduk yang besar akan dihadapkan persoalan meningkatnya jumlah pengangguran, permasalahan kebutuhan untuk pemukiman serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah sosial lainnya. Disisi lain diwilayah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi sumberdaya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja.

Tabel 1.2 Persentase Penduduk Perkotaan dan Kepadatan Penduduk Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat 2010-2016

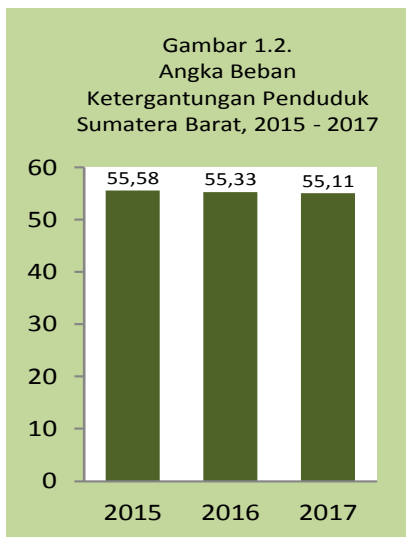
Tahun	% Penduduk Perkotaan	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)	
		Kota	Kabupaten
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	38,84	1 066	87
2011	39,84	1 083	88
2012	40,93	1 101	89
2013	42,03	1 118	90
2014	43,13	1 135	91
2015	44,22	1 152	92
2016	45,29	1 168	93
2017	46,36	1 184	94

Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2035

Salah satu indikator kemajuan di bidang persebaran penduduk adalah meningkatnya jumlah penduduk perkotaan. Penduduk perkotaan adalah penduduk suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan tertentu dan telah menikmati sejumlah fasilitas perkotaan, seperti jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya. Semakin tinggi jumlah penduduk perkotaan maka semakin banyak jumlah penduduk yang dapat menikmati fasilitas perkotaan baik yang ada di kota maupun di kabupaten.

1.3 ANGKA BEBAN KETERGANTUNGAN

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi angka beban ketergantungan menunjukkan semakin besar tanggungan penduduk produktif untuk membiayai penduduk tidak produktif. Sebaliknya semakin rendah angka ketergantungan menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang tidak produktif.



Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2035

Keberhasilan pembangunan kependudukan dapat dilihat dari pergeseran komposisi penduduk usia penduduk yang mendorong rendahnya angka beban ketergantungan. Selama periode 2015-2017 angka beban ketergantungan terus turun. Pada tahun 2015 angkanya 55,58 artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 56 orang penduduk usia tidak produktif dan pada tahun 2017 angkanya turun menjadi 55,11.

Tabel 1.3 Komposisi Penduduk (%), dan Angka Ketergantungan Penduduk Sumatera Barat 2015-2017

Tahun	0-14 tahun	15-64 tahun	65 tahun +	Angka beban ketergantungan (Jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015	30,25	64,27	5,47	55,58
2016	30,07	64,38	5,55	55,33
2017	29,86	64,47	5,67	55,11

Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2035

Rasio ketergantungan yang terus turun akan menuju era bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif semakin banyak yang dapat dijadikan sebagai pendorong aktivitas yang pada akhirnya diharapkan usia produktif mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini akan terjadi jika sebagian besar dari mereka bekerja sebaliknya mereka akan menjadi beban dari pembangunan ekonomi apabila sebagian besar dari mereka tidak bekerja.

Tabel 1.3 memperlihatkan bahwa penurunan angka beban ketergantungan sangat ditentukan oleh menurunnya persentase penduduk usia tidak produktif muda usia 0 – 14 tahun sedangkan persentase penduduk tidak produktif tua usia 65 tahun keatas justru semakin besar. Komposisi penduduk usia produktif di Sumatera Barat paling besar dan terus meningkat tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan penduduk usia produktif sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan.

1.4 FERTILITAS

Kelahiran (fertilitas) merupakan faktor yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk di suatu wilayah selain kematian (mortalitas) dan Perpindahan Penduduk (migrasi). Angka fertilitas yang tinggi akan menyebabkan jumlah penduduk meningkat, sebaliknya jika fertilitas tidak dapat dikendalikan maka bisa menyebabkan terjadinya ledakan penduduk. Penduduk yang besar akan menjadi beban dan akan menghambat pembangunan nasional.

Tabel 1.4 Perkembangan ASFR Sumatera Barat 1971 - 2010

Kelompok Umur	SP71 (1967-1970)	SP80 (1976-1979)	SP90 (1986-1989)	SP2000 (1996-1999)	SP2010 (2006)-(2009)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15-19	129	102	49	32	28
20-24	313	289	191	130	123
25-29	317	299	215	166	166
30-34	255	244	174	143	140
35-39	152	151	107	89	88
40-44	59	58	35	39	31
45-49	11	8	7	12	6
TFR	6,18	5,75	3,89	3,06	2,91

Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2035

Berdasarkan hasil sensus penduduk (SP) 1971-2010 menunjukkan bahwa tingkat fertilitas pada wanita usia subur disetiap kelompok umur terus mengalami penurunan kecuali pada kelompok umur 45-49 tahun yang mengalami perkembangan berfluktuasi.

Usia 25 – 29 tahun merupakan usia paling produktif untuk melahirkan anak dimana hasil sensus penduduk 1971 angkanya mencapai 317 dan meskipun terus turun pada hasil sensus penduduk 2010 tetap tertinggi yaitu 166. Pergeseran terjadi pada kelompok umur ibu 20-24 tahun dan 30-34 tahun, meskipun dalam perkembangannya dari sensus ke sensus menunjukkan terjadi penurunan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan, tetapi rata-rata jumlah anak yang dilahirkan pada kelompok umur ibu 20-24

tahun pada hasil sensus 1971 rangking dua setelah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan kelompok umur 25-29 tahun sedangkan rata-rata anak yang dilahirkan kelompok umur ibu 30-34 tahun menduduki rangking ke tiga. Tetapi mulai dari hasil sensus penduduk 2000 rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu umur 30-34 tahun justru lebih besar dari rata-rata jumlah anak yang dilahirkan ibu umur 20-24 tahun. Artinya terjadi pergeseran pola melahirkan dari usia muda ke usia tua.

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur adalah Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*), Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate/CBR*), Angka Reproduksi Kasar (*Gross Reproductive Rate/GRR*) dan Angka Reproduksi Neto (*Net Reproductive Rate/NRR*). TFR adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya.

Tabel 1.5 Perkembangan TFR, GRR, NRR, CBR dan Jumlah Kelahiran di Sumatera Barat, 2010-2015

Indikator Fertilitas	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
TFR	2,91	2,89	2,86	2,84	2,82	2,80
GRR	1,41	1,40	1,39	1,38	1,37	1,36
NRR	1,32	1,31	1,30	1,30	1,29	1,28
CBR	22,6	22,2	22,0	21,8	21,6	21,4
Jumlah Kelahiran (000)	109,8	109,7	110,3	110,9	111,5	112,0

Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2035

Tabel 1.5 memperlihatkan bahwa TFR selama periode 2010-2015 mengalami penurunan dari 2,91 tahun 2010 menjadi 2,8 tahun 2015. Meskipun dalam dua periode tersebut menunjukkan bahwa rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan oleh seorang wanita hingga akhir masa reproduksinya (usia 15- 49 tahun) adalah 3 anak.

GRR adalah banyaknya bayi perempuan yang dilahirkan oleh perempuan selama masa reproduksi. GRR selama kurun waktu 2010-2015 turun dari 1,41 menjadi 1,36 pada tahun 2015.

NRR adalah jumlah bayi perempuan yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya dan dapat menggantikan ibunya untuk bereproduksi dengan mengikuti pola fertilitas dan mortalitas ibunya. NRR memperhitungkan kemungkinan si bayi perempuan meninggal sebelum mencapai akhir masa reproduksinya. NRR merupakan ukuran kemampuan suatu populasi untuk menggantikan dirinya (*replacement level*). NRR bernilai satu berarti suatu populasi dapat menggantikan dirinya dengan jumlah yang sama. NRR bernilai lebih dari satu berarti bahwa suatu populasi dapat menggantikan dirinya dengan jumlah yang lebih besar, sementara NRR kurang dari satu berarti populasi tidak mampu menggantikan dirinya dengan jumlah yang sama. NRR selama kurun waktu 2010 – 2015 tidak mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 1,2 menjadi hanya 1,1.

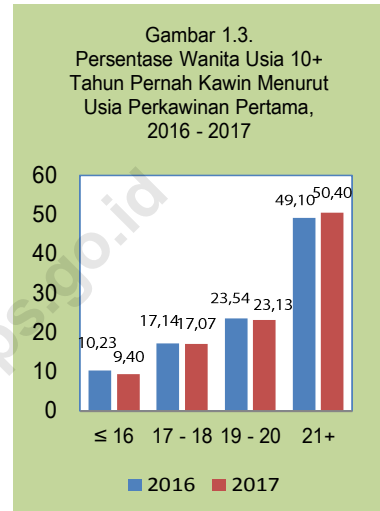
CBR adalah banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Indikator CBR digunakan untuk mengetahui tingkat kelahiran di suatu daerah tertentu pada waktu tertentu. CBR selama kurun waktu 2010-2015 mengalami penurunan dari 22,6 pada tahun 2010 menjadi 21,4 tahun 2015.

1.5 WANITA MENURUT USIA PERKAWINAN PERTAMA

Salah satu masalah penduduk adalah tingginya tingkat kelahiran disuatu daerah. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksinya semakin banyak jumlah yang dilahirkan. Semakin muda usia kawin pertama seseorang maka semakin panjang masa reproduksinya.

Batas usia kawin menurut Undang-Undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16

tahun, sedangkan menurut undang-undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara menurut BKKBN usia perkawinan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.



Sumber : BPS, Susenas 2016-2017

Hasil Susenas 2017, di Provinsi Sumatera Barat masih ada sekitar 10 persen wanita yang melakukan perkawinan pertama diusia 16 tahun atau kurang. Angka ini turun bila dibandingkan dengan tahun 2016, hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pernikahan di usia yang ideal karena masa usia ini seseorang masih dapat dikatakan sebagai anak-anak yang belum siap untuk membina sebuah keluarga.

Sebagian besar wanita melakukan perkawinannya di usia 21 tahun atau lebih yang mencapai lebih 50 persen, dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami peningkatan.

Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase wanita yang melakukan perkawinan pada usia 16 tahun kebawah baik tahun 2016 dan tahun 2017 cenderung lebih tinggi di daerah perdesaan

Tabel 1.6 Persentase Wanita Umur 10 + Tahun Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama di Sumatera Barat, 2016 dan 2017.

Kelompok Umur	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
≤ 16	5,78	5,72	13,07	11,90	10,23	9,40
17-18	11,68	11,77	20,63	20,67	17,14	17,07
19-20	18,79	18,39	26,57	26,35	23,54	23,13
21+	63,74	64,12	39,73	41,08	49,10	50,40

Sumber : BPS, Susenas 2016 dan 2017

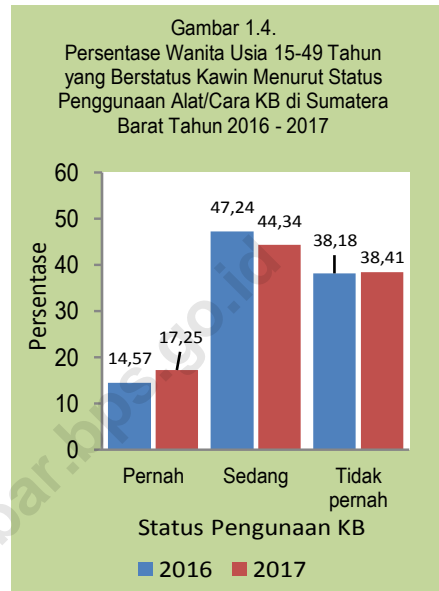
dibandingkan dengan daerah perkotaan. Demikian juga pada kelompok umur 17-18 tahun dan umur 19-20 tahun persentase di perdesaan tetap lebih tinggi dari perkotaan. Sebaliknya pada kelompok umur 21 tahun dan di atasnya diperkotaan memiliki persentase yang cenderung lebih tinggi dari perdesaan. Keadaan ini menjelaskan bahwa tingkat kesadaran penduduk diperkotaan tentang umur perkawinan ideal lebih baik dari penduduk di perdesaan.

1.6 PENGGUNAAN ALAT/CARA KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang bermacam jenisnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat.

Berdasarkan hasil Susenas 2016 – 2017 persentase wanita Berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB sudah mencapai 47,24 persen tahun 2016 dan 44,34 persen tahun 2017. Jika dilihat menurut tempat tinggal wanita usia 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan kontrasepsi di daerah

perdesaan sedikit lebih tinggi dibanding di daerah perkotaan dimana tahun 2017 perbandingannya adalah 48,01 persen di perdesaan dan 38,88 persen di perkotaan.



Sumber : BPS, Susenas 2016 dan 2017

Jika dilihat dari Alat/Cara KB yang digunakan, suntikan dan Pil mendominasi alat/cara KB yang digunakan. Pada tahun 2016 penggunaan suntikan mencapai 53,30 persen dan sedikit meningkat menjadi 53,73 persen tahun 2017. Sementara itu penggunaan Pil justru mengalami penurunan dari 14,89 persen menjadi 13,98 persen. Perkembangan penggunaan alat/cara KB dari tahun 2016 – 2017 hampir semua jenis alat/cara KB diluar spiral dan kondom mengalami peningkatan selama satu tahun terakhir. Kalau hal ini tetap terjadi berarti terjadi penggunaan alat/cara KB yang lebih bervariasi untuk masa mendatang

Jenis alat/cara KB yang paling sedikit digunakan adalah intravag/tissue/kondom wanita dan MOP/Vasektomi masing-masing persentasenya kurang dari 1 persen.

Berdasarkan tempat tinggal wanita kawin berumur 15-49 tahun diperkotaan secara persentase lebih tinggi dalam

penggunaan alat /cara KB MOW/Vasektomi, MOP/Tubektomi, AKDR/IUD/Spiral, Kondom, dan Cara Tradisional dibandingkan dengan Perdesaan. Wanita diperdesaan lebih banyak menggunakan Suntikan dan KB/Norplan/Implanon/ Alwalit , Intravag dan PIL. Ternyata wanita berumur 15-49 tahun diwilayah perkotaan lebih banyak menggunakan cara KB Tradisional dibandingkan dengan Wanita di Wilayah Perdesaan.

Tabel 1.7 Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Menurut Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan di Sumatera Barat Tahun 2016-2017

Alat/Cara KB yang digunakan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
MOW/Tubektomi	6,37	7,84	3,73	3,80	4,69	5,22
MOP/Vasektomi	0,85	1,21	0,37	0,48	0,54	0,74
AKDR/IUD/Spiral	16,52	14,65	6,21	6,04	9,96	9,07
Suntikan	42,81	46,46	59,29	57,68	53,30	53,73
SususkB/Norplant/Implan	8,36	8,72	13,46	13,80	11,61	12,01
Pil	16,78	13,82	13,81	14,07	14,89	13,98
Kondom/karet	5,37	3,65	1,26	1,76	2,75	2,42
Intravag/kondom wanita	0,04	0,43	0,18	0,05	0,13	0,18
Cara tradisional	2,90	3,23	1,69	2,32	2,13	2,65
% Wanita Yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi	43,57	38,88	49,63	48,01	47,24	44,34

Sumber: BPS, Susenas 2016 dan 2017

BAB

2

KESEHATAN DAN GIZI

<https://sumbar.bps.go.id>

2. KESEHATAN DAN GIZI

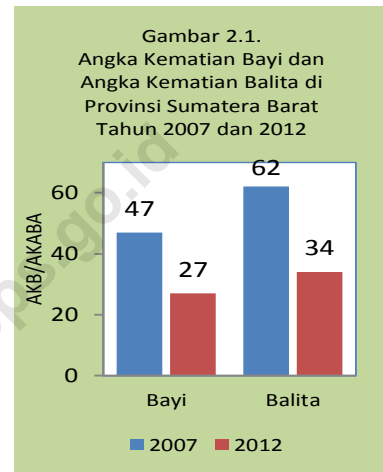
Sustainable Development Goals (SDGs) adalah sebuah komitmen bersama masyarakat internasional untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan perpanjangan program tujuan pembangunan milenium. Salah satu tujuan SDGs yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat disegala umur, diantaranya dengan melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan angka kematian bayi dan balita, menurunkan angka kesakitan masyarakat, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang, serta meningkatkan angka harapan hidup.

2.1 DERAJAT DAN STATUS KESEHATAN PENDUDUK

Angka kematian bayi dan balita merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai sejauh mana pencapaian kesejahteraan rakyat sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan. Kegunaan lain dari angka kematian bayi dan balita adalah sebagai alat monitoring situasi kesehatan dan sebagai input penghitungan proyeksi penduduk serta dapat juga dipakai untuk mengidentifikasi kelompok penduduk yang mempunyai resiko kematian tinggi.

Angka kematian bayi (AKB) di Indonesia termasuk kategori tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura yang sudah dibawah 10 kematian per 1.000 kelahiran hidup. AKB Indonesia mengalami penurunan secara berangsur-angsur.

Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 1994 sebesar 57 kematian per 1.000 kelahiran hidup, turun menjadi 32 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2012. Begitu juga dengan angka kematian balita (AKABA) di Indonesia, dari 81 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1994 menjadi 40 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2012.



Sumber: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), 2007 dan 2012

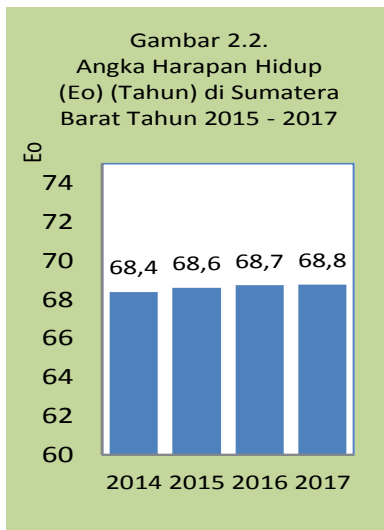
Penurunan AKB yang tidak berlangsung cepat, tetapi turun perlahan secara eksponensial juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat. AKB Sumatera Barat pada tahun 1994 sebesar 68 kematian per 1.000 kelahiran hidup, turun menjadi 27 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2012. Begitu juga dengan angka kematian balita (AKABA) di Sumatera Barat, dari 98 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1994 menjadi 34 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2012. Diantara provinsi-provinsi di Indonesia, posisi

Tabel 2.1. Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita Sumatera Barat (per 1.000 Kelahiran), 1994-2012

Indikator Kesehatan	SDKI 1994	SDKI 1997	SDKI 2002-2003	SDKI 2007	SDKI 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Kematian Bayi	68	66	48	30	27
Angka Kematian Balita	98	95	62	62	34

Sumber: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), 1994 - 2012

Sumatera Barat apabila dilihat dari AKB-nya tahun 2012, termasuk kelompok menengah. AKB terendah yaitu Provinsi Kalimantan Timur dengan 21 kematian per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan yang tertinggi adalah Provinsi Papua Barat dengan 74 kematian per 1.000 kelahiran hidup.



Sumber : BPS, IPM Sumatera Barat 2014-2017

Sumber data untuk harapan hidup, tingkat kematian dan jumlah kematian pada publikasi tahun 2016 ini merujuk pada angka hasil proyeksi penduduk 2010-2015. Angka harapan hidup masyarakat di Sumatera Barat mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya pola perilaku hidup sehat dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, tercatat rata-rata penduduk Sumatera Barat yang lahir tahun 2014 akan dapat menjalani kehidupannya hingga usia 68,4 tahun dan untuk penduduk yang lahir tahun 2017 menjadi lebih panjang usianya hingga 68,8 tahun. Sedangkan menurut jenis kelamin, angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dari laki-laki, pada tahun 2017 masing-masing sebesar 70,7 tahun untuk perempuan dan 66,9 tahun untuk laki-laki. Selama periode 2015-2017 pergerakan

angka harapan hidup perempuan dan laki-laki cenderung stagnan sehingga *gap* capaian tidak berubah. Perbedaan level atau *gap* yang terjadi pada angka harapan hidup merupakan fenomena yang umum. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor biologis dan gaya hidup. Secara biologis, laki-laki lebih berisiko meninggal jika lahir prematur. Karena perempuan mempunyai hormon estrogen yang menjadi salah satu pelindung alami dari perkembangan penyakit jantung dan perubahan kondisi tubuh perempuan sepanjang hidupnya. Perubahan kondisi tubuh dari menstruasi, kehamilan, melahirkan, hingga menopause membuat tubuh perempuan secara internal lebih 'tahan banting'. Sebaliknya, hormon testosteron yang dimiliki pria cenderung mendorong aktifitas yang lebih berisiko seperti merokok sehingga berpengaruh pada keselamatan hidupnya. Dilihat dari aspek gaya hidup, secara umum lebih banyak laki-laki yang bekerja dan beraktivitas diluar dibandingkan dengan perempuan. Padatnya aktivitas kerja yang dilakukan tentu berpotensi "mendatangkan" berbagai macam resiko, seperti stres, depresi, lingkungan yang tidak sehat, obesitas hingga ke penyakit-penyakit menular yang berbahaya. Selain itu pekerjaan yang berisiko seperti supir, pekerja bangunan, dan lain-lain lebih

Tabel 2.2. Perkembangan Angka Harapan Hidup (Eo), IMR, CDR dan Jumlah Kematian, Sumatera Barat tahun 2012-2017

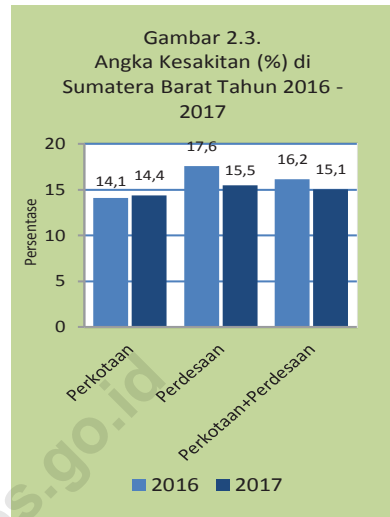
Indikator Fertilitas	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Eo Laki-laki	66,1	66,3	66,5	66,7	66,94	66,90
Eo Perempuan	70,0	70,2	70,4	70,6	70,70	70,65
Eo Laki-laki +Perempuan	68,1	68,2	68,4	68,6	68,73	68,78
IMR Laki-laki	41,1	40,3	39,5	38,8	-	-
IMR Perempuan	31,2	30,5	29,9	29,3	-	-
IMR Laki-laki +Perempuan	36,3	35,6	34,9	34,2	-	-
CDR	7,6	7,6	7,5	7,6	-	-
Jumlah Kematian (000)	38,20	38,47	38,81	39,19	-	-

Sumber : Proyeksi Penduduk 2010 - 2035

Ket : - Data Tidak Tersedia

banyak dilakukan oleh laki-laki. Akibatnya resiko kecelakaan kerja juga lebih banyak dialami laki-laki dibandingkan perempuan.

Salah satu indikator untuk mengukur derajat kesehatan yang optimal yaitu dengan melihat indikator-indikator kematian. Pada tahun 2015, jumlah kematian di Sumatera Barat tercatat 39.190 orang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kematian dalam masyarakat diantaranya faktor sosial ekonomi seperti kurangnya pengetahuan tentang kesehatan, gizi dan kesehatan lingkungan. Akibat kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan membuat seseorang memiliki pola hidup yang tidak sehat sehingga lama kelamaan akan mengalami gangguan kesehatan. Keluhan kesehatan ini dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas bekerja, sekolah dan kegiatan sehari-hari lainnya yang selanjutnya disebut sebagai kesakitan/morbiditas. Menurunnya angka morbiditas pada tahun 2017 dapat dikatakan sebagai kondisi kesehatan yang meningkat, dan terjadi penurunan rata-rata lama sakit penduduk. Hasil Susenas 2016 dan 2017 mencatat bahwa rata-rata lama sakit penduduk berada pada kisaran 6 hari. Selama tahun 2016-2017 menunjukkan bahwa rata-rata sakit penduduk di pedesaan sedikit lebih lama dibandingkan di perkotaan. Rata-rata lama sakit penduduk yang tinggal di perkotaan dan pedesaan tahun 2017 mengalami penurunan. Rata-rata lama sakit penduduk perkotaan 2017 turun dari 6,09 hari menjadi 5,82 hari tahun 2016. Sedangkan rata-rata lama sakit penduduk yang tinggal di pedesaan juga menurun dari 6,47 hari menjadi 6,04 hari selama periode 2016-2017. Semakin lama rata-rata lama sakit maka keluhan kesehatan suatu penyakit yang dialami penduduk dapat diasumsikan cukup serius dan dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk.



Sumber : BPS, Susenas 2015 dan 2016

Tabel 2.3 Angka Kesakitan dan Rata-Rata Lamanya Sakit Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2016 - 2017

Indikator Kesehatan	Perkotaan		Pedesaan		Perkotaan+ Pedesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angka Kesakitan (%)	14,09	14,40	17,60	15,51	16,16	15,05
Lama Sakit (hari)	6,09	5,82	6,47	6,04	6,33	5,95

Sumber : Susenas 2016 dan 2017

2.2 PEMBERIAN ASI DAN IMUNISASI

Kesehatan dan gizi pada tahun pertama kehidupan bayi akan menentukan tingkat kesehatan, intelektual dan produktivitas di masa depan. Mendapatkan air susu ibu (ASI) merupakan permulaan terbaik di awal kehidupan bayi untuk proses tumbuh kembang anak karena ASI mengandung antibodi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi. Selain itu, ASI juga dapat melindungi tubuh bayi dari alergi, diare dan penyakit infeksi lainnya. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan ke depan tanpa tambahan makanan dan minuman lain termasuk juga air putih. Selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan keatas tetap diberi ASI dan dilanjutkan dengan pemberian makanan tambahan hingga usia 2 tahun.

Tabel 2.4 Persentase Anak Usia 0-23 bulan yang Pernah Disusui dan Lamanya disusui di Sumatera Barat Tahun 2016 dan 2017

Daerah Tempat Tinggal	Anak Usia 0-23 bulan yang pernah disusui (%)		Rata-rata lama Disusui (bulan)	
	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	97,34	96,22	10,31	10,88
Perdesaan	97,71	96,41	10,79	10,95
Perkotaan + Perdesaan	97,56	96,33	10,59	10,92

Sumber: BPS, Susenas, 2016-2017

Berdasarkan data Susenas 2016 dan 2017 di Sumatera Barat persentase anak usia 0-23 bulan yang pernah disusui tahun 2016 sebanyak 97,56 persen dan tahun 2017 turun menjadi 96,33 persen. Jika dilihat per wilayah, ternyata lebih banyak persentase anak usia 24-59 bulan yang pernah disusui dan tinggal di daerah perdesaan dibandingkan di daerah perkotaan. Pada tahun 2017 di persentase anak 0-23 bulan yang pernah disusui dan tinggal di daerah perdesaan ada sebanyak 96,41 persen sedangkan di perkotaan

sebanyak 96,22 persen.

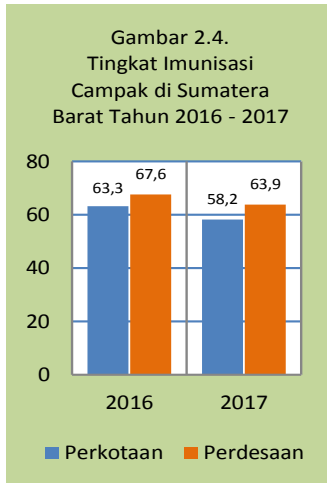
Walaupun jumlah anak yang disusui mengalami penurunan, namun rata-rata lamanya seorang ibu dapat menyusui bayinya pada tahun 2017 mengalami peningkatan, yakni dari 10,59 bulan menjadi 10,92 bulan atau naik sebesar 3,12 persen. Begitu juga rata-rata lama anak disusui di daerah perdesaan dan perkotaan pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun sebelumnya, masing-masing tercatat 10,88 bulan di perkotaan dan 10,95 bulan di perdesaan. Masing-masing naik sebesar 5,53 persen di perkotaan dan 1,48 persen di perdesaan. Namun, rata-rata lamanya seorang ibu menyusui di Sumatera Barat masih jauh dari yang dianjurkan oleh pemerintah yakni selama 2 tahun.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemungkinan besar anak usia 0-23 bulan di daerah pedesaan mendapatkan tingkat imunitas dan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan di daerah perkotaan. Hal ini dikarenakan ibu-ibu yang tinggal di perkotaan kebanyakan bekerja membantu ekonomi keluarga dan tidak memiliki waktu yang lebih banyak untuk menyusui anaknya dibandingkan ibu-ibu yang tinggal di perdesaan.

Selain ASI, imunisasi juga sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap penyakit. Jenis imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif dimana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang

disekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B.

Namun jika dilihat berdasarkan jenis imunisasi yang didapatkan oleh balita, jenis imunisasi campak tercatat yang paling sedikit didapatkan oleh balita terutama di daerah perkotaan, yakni dibawah 58,2 persen. Persentase ini mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 ada sekitar 63,3 persen balita yang mendapat imunisasi campak.



Sumber: BPS, Susenas 2016 dan 2017

Berdasarkan data Susenas 2016 dan 2017, rata-rata balita yang pernah mendapatkan imunisasi lengkap pada tahun 2017 hanya sebanyak 37,71 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan sebanyak 31,12 persen. Hal ini bisa jadi disebabkan adanya isu yang tidak benar tentang pemberian imunisasi kepada balita seperti isu tentang beredarnya imunisasi palsu.

Tabel 2.5 Persentase Anak Umur 12-59 Bulan yang Pernah Diimunisasi di Sumatera Barat Menurut Jenis Imunisasi, 2016 dan 2017

Jenis Imunisasi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
BCG	84,92	83,12	87,02	84,10	86,18	83,71
DPT	79,32	75,61	80,41	78,07	79,97	77,08
Polio	85,13	82,05	87,79	84,04	86,73	83,24
Campak	63,32	58,19	67,59	63,87	65,85	61,59
Hepatitis B	80,85	74,10	79,59	73,47	80,09	73,72

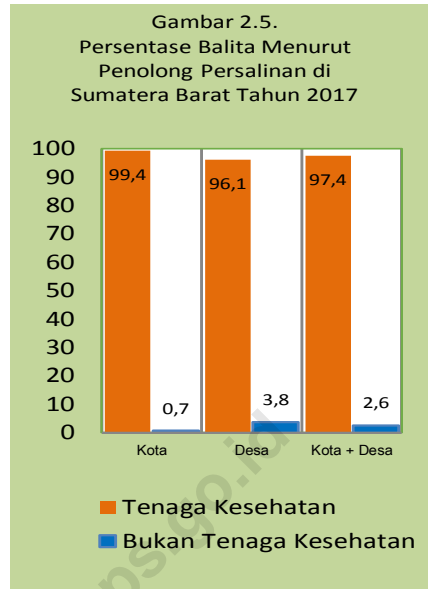
Sumber : BPS, Susenas 2016 dan 2017

2.3 PEMANFAATAN FASILITAS TENAGA KESEHATAN

Untuk menurunkan angka kematian ibu salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis, karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Persalinan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan dapat berakibat fatal terhadap keselamatan ibu dan bayinya. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan dan tenaga kesehatan ke pelosok-pelosok desa dengan cara menempatkan bidan di desa-desa.

Usaha pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan ternyata memperlihatkan hasil yang baik, dimana persentase perempuan yang melahirkan di tolong tenaga kesehatan sudah cukup baik, yaitu 97,43 persen. Sedangkan yang sisanya 2,57 persen ditolong oleh selain tenaga kesehatan seperti dukun beranak, paraji dan sebagainya.

Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, terlihat di daerah perkotaan relatif lebih banyak persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan daripada di daerah perdesaan. Hal ini wajar karena di daerah perkotaan



Sumber : BPS. Susenas 2017

ketersediaan sarana pelayanan dan tenaga medis lebih banyak dan lengkap. Namun di daerah perdesaan yang persalinannya ditolong oleh bukan tenaga kesehatan relatif sedikit, yaitu hanya 3,80 persen. Dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Sumatera Barat cukup tinggi terhadap pentingnya tenaga kesehatan dalam menolong proses persalinan dibandingkan dengan yang bukan tenaga kesehatan.

Tabel 2.6 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Sumatera Barat Tahun 2016 dan 2017

Penolong Persalinan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tenaga Kesehatan						
-Dokter	47,50	39,85	27,63	28,66	36,14	33,04
-Bidan	50,61	59,04	65,89	67,19	59,35	64,00
-Perawat/ Tenaga Kesehatan Lainnya	0,36	0,46	0,37	0,35	0,37	0,39
-Dukun beranak	1,53	0,65	5,68	3,71	3,90	2,51
-Lainnya	0,00	0,00	0,43	0,09	0,24	0,06

Sumber : BPS. Susenas , 2016-2017

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan tidak hanya dilihat dari indikator penolong persalinan tetapi juga dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Sejak diterapkannya BPJS secara nasional mulai Januari tahun 2014 yang lalu, diharapkan dapat membuka akses dan peluang yang lebih besar kepada masyarakat secara umum untuk mendapatkan haknya dalam hal pelayanan kesehatan. Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada. Perbedaan kualitas kesehatan yang nyata antara penduduk di perdesaan dengan penduduk perkotaan dapat disebabkan oleh perbedaan ketersediaan dan jarak menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, ditambah lagi perilaku penduduk itu sendiri. Tingginya persentase penduduk di daerah perkotaan yang memanfaatkan berobat ke rumah sakit pemerintah dan swasta, praktek dokter/klinik bersama dan puskesmas/pustu, mengingat lebih mudahnya akses dan kualitas pelayanannya jauh lebih baik dibandingkan dengan di daerah perdesaan. Sedangkan di daerah perdesaan lebih banyak memilih tempat berobat ke praktek dokter/bidan, UKBM dan pengobatan tradisional.

Persentase penduduk yang berobat ke rumah sakit pemerintah maupun swasta menurun dari 12,03 persen pada tahun 2016 menjadi 12,63 persen tahun 2017. Begitu pula dengan pemanfaatan puskesmas/pustu, namun untuk pemanfaatan praktek dokter/ bidan justru mengalami peningkatan dan paling banyak yang dikunjungi oleh masyarakat Sumatera Barat untuk berobat. Pada tahun 2016, persentase penduduk yang berobat ke praktek dokter/bidan tercatat 47,76 persen dan tahun 2017 meningkat menjadi 48,18 persen. Hal ini berkaitan dengan sudah banyaknya tempat praktek dokter/bidan yang melayani pasien BPJS. Hal yang sama juga terlihat di tempat klinik/praktek dokter bersama, tercatat mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan penduduk yang pergi ke puskesmas tercatat sebesar 30,34 persen pada tahun 2016 turun menjadi 29,50 persen pada tahun 2017, begitu pula dengan penduduk di perdesaan yang memanfaatkan puskesmas sebagai tempat untuk memeriksakan sakitnya menurun dari 29,89 persen pada tahun 2016 menjadi 29,11 persen pada tahun 2017 dan di perkotaan juga mengalami penurunan menjadi 30,02 persen pada tahun 2017 dari 30,98 persen pada tahun 2016.

Tabel 2.7 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Sumatera Barat, 2016 dan 2017

Tempat Berobat	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rumah Sakit Pemerintah	8,98	10,22	7,54	7,88	8,13	8,87
Rumah Sakit Swasta	6,68	7,11	1,96	1,29	3,90	3,76
Praktek Dokter/Bidan	44,51	40,88	50,03	53,56	47,76	48,18
Klinik/Praktek Dokter Bersama	8,52	10,75	4,35	4,13	6,07	6,94
Puskesmas/Pustu	30,98	30,02	29,89	29,11	30,34	29,50
UKBM*	2,89	2,76	5,50	6,26	4,43	4,77
Pengobatan tradisional	3,74	4,21	7,81	7,52	6,14	6,12
Lainnya	1,63	0,70	1,29	0,31	1,43	0,47
% penduduk yang berobat jalan	67,53	55,52	68,70	58,83	68,21	57,38

Sumber : BPS Susenas 2016-2017

Ket: * UKBM terdiri dari Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan

Sedangkan hal yang menarik adalah penduduk yang berobat jalan ke tempat lainnya (UKBM dan pengobatan tradisional) justru mengalami peningkatan baik di perkotaan maupun di perdesaan, di perkotaan tercatat 6,63 persen pada tahun 2016 meningkat menjadi 6,97 persen pada tahun 2017, di perdesaan 13,31 persen menjadi 13,78 persen, dan secara total 10,57 persen menjadi 10,89 persen pada tahun 2017.

Tabel 2.8 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2017

Daerah Tempat Tinggal	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	54.05	56.84	55.52
Perdesaan	59.88	57.90	58.83
Perkotaan + Perdesaan	57.33	57.43	57.38

Sumber: BPS Susenas, 2017

Sementara itu, penduduk yang berobat jalan baik di perkotaan maupun di perdesaan mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Di perkotaan penduduk yang berobat jalan memeriksakan penyakit turun dari 67,53 persen pada tahun 2016 menjadi 55,52 persen pada tahun 2017, penduduk yang berobat jalan di perdesaan pada tahun 2016 tercatat sebesar 68,70 persen turun menjadi 58,83 persen pada tahun 2017. Begitu pula secara total penduduk yang berobat jalan turun dari 68,21 persen pada tahun 2016 menjadi 57,38 persen pada tahun 2017.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase penduduk perempuan yang berobat jalan selama sebulan terakhir lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki, dimana penduduk perempuan yang berobat jalan pada tahun 2017 tercatat 57,43 persen sedangkan penduduk laki-laki sebanyak

57,33 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan lebih sering mengalami keluhan kesehatan dan memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk mengobati keluhan kesehatannya dibandingkan dengan laki-laki.

Lebih banyaknya penduduk perempuan yang berobat jalan di Sumatera Barat sejalan dengan banyaknya penduduk perempuan yang memiliki jaminan kesehatan terutama di daerah perkotaan dibandingkan penduduk laki-laki. Persentase penduduk perempuan yang memiliki jaminan kesehatan pada tahun 2017 tercatat 56,70 persen dan penduduk laki-laki sebanyak 55,14 persen. Untuk penduduk perempuan yang tinggal di perkotaan ada sebanyak 66,73 persen memiliki jaminan kesehatan dan 65,79 persen penduduk laki-laki di daerah perkotaan.

Tabel 2.9 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Daerah dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2017

Daerah Tempat Tinggal	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	65.79	66.73	66.27
Perdesaan	47.61	49.58	48.60
Perkotaan + Perdesaan	55.14	56.70	55.93

Sumber : BPS, Susenas 2017

BAB

3

PENDIDIKAN

<https://sumbar.bps.go.id>

<https://sumbar.bps.go.id>



3. PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan kunci utama pembangunan manusia dan kemajuan suatu bangsa. Budaya berpikir kritis, ilmiah, dan inovatif hanya dapat tumbuh melalui pendidikan yang baik, seperti halnya pembangunan karakter, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan daya saing individu maupun bangsa. Kini, setelah 73 tahun merdeka, kita bisa menyaksikan sektor pendidikan yang berkembang kian baik. Ikhwal tingkat buta aksara di masyarakat, misalnya, telah menurun tajam. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bidang Pendidikan dan Kebudayaan (UNESCO) memberikan penghargaan kepada Indonesia atas capaian dalam bidang kemampuan membaca dan menulis (literasi), yaitu sebesar 95 persen pada 2012. Itu artinya angka buta huruf tinggal 5 persen atau hampir mendekati Singapura. Angka tersebut tentu tak punya makna apa-apa jika Indonesia tak bisa menghadapi masalah kesenjangan kualitas dan kuantitas sumber daya pendidikan di perkotaan dan perdesaan.

Program wajib belajar secara menyeluruh pada level pendidikan dasar di Indonesia merupakan keputusan politik yang tak dapat diabaikan. Asumsi yang mendasari pentingnya keputusan politik tersebut, secara legal formal tertuang dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa "setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar". Hal ini penting sebagai suatu batas minimal bagi seseorang agar dapat hidup secara efektif, efisien dan produktif di dalam masyarakat. Melalui wajib belajar sembilan tahun berarti bahwa semua warga negara yang berumur 9-15 tahun akan di persiapkan sedemikian rupa melalui pendidikan untuk kelak menjadi warga negara yang dapat memainkan perannya secara terbuka dan demokratis. Mengingat strata kelompok ini cukup besar dan cenderung bertambah, maka kehadirannya menjadi penting untuk diperhitungkan.

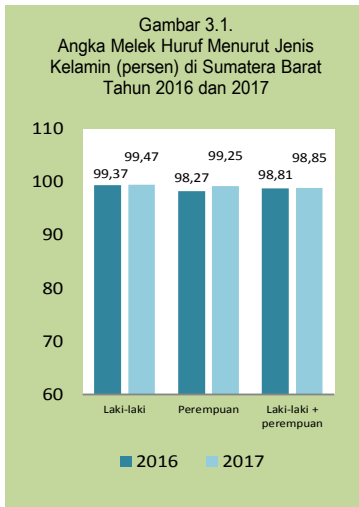
Beberapa indikator output yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan antara lain Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata lama sekolah, Tingkat Pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator input pendidikan salah satunya adalah fasilitas pendidikan.

3.1 ANGKA MELEK HURUF

Kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis merupakan suatu ukuran yang paling mendasar dari tingkat pendidikan, karena membaca dan menulis merupakan pintu gerbang masuknya berbagai ilmu dalam kehidupan seseorang. Sehingga tanpa penguasaan terhadap kemampuan dasar tersebut, bisa dikatakan akan sangat sulit untuk bisa menguasai ilmu yang lebih tinggi lagi. Uraian diatas mempertegas bahwa indikator ini dapat menjadi suatu ukuran yang menunjukkan tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah.

Definisi angka melek huruf (*literacy rate*) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf (AMH) ini seringkali dijadikan sebagai suatu ukuran kemampuan penduduk di suatu daerah dalam menyerap informasi dari berbagai media yang ada, selain itu angka tersebut juga mencerminkan perkembangan tingkat intelektual penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Sehingga tidak salah jika menggunakan angka ini sebagai suatu alat ukur evaluasi dari program-program pemerintah di bidang pendidikan.

Pada tahun 2017 masih ada sekitar 1,15 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis huruf



Sumber: BPS, Susenas 2016 dan 2017

latin, artinya bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas terdapat sekitar 1 orang yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin. Dibandingkan dengan tahun 2016, AMH penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2017 mengalami peningkatan. Berdasarkan tabel 3.1, angka melek huruf penduduk laki-laki masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan penduduk perempuan. Dibandingkan tahun 2016, AMH laki-laki mengalami peningkatan, begitu juga dengan AMH perempuan.

AMH penduduk laki-laki tahun 2017 tercatat sebesar 99,47 persen sedangkan perempuan sebanyak 99,25 persen. Jika dilihat berdasarkan tempat tinggal, AMH penduduk yang tinggal di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk di perdesaan, baik penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan. Perkembangan AMH penduduk di perkotaan cenderung meningkat, yakni dari 99,29 persen tahun 2016 menjadi 99,42 persen pada tahun 2017. Sedangkan AMH penduduk di perdesaan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016, dari 98,47 persen menjadi 98,43 persen tahun 2017.

3.2 RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata lamanya pendidikan yang telah ditempuh oleh sekelompok orang dewasa (usia >25 tahun) di suatu wilayah. Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang telah ditetapkan oleh UNDP pada tahun 1990 untuk penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Lama sekolah seseorang dihitung berdasarkan jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki dengan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Sebagai gambaran, seseorang yang telah menamatkan pendidikan sampai tingkat SD maka ia telah memiliki

Tabel 3.1 Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur, Jenis kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat, 2016 dan 2017

Jenis Kelamin	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(5)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki + Perempuan	99,29	99,42	98,47	98,43	98,81	98,85
Laki-Laki	99,58	99,78	99,21	99,24	99,37	99,47
Perempuan	99,01	99,07	97,74	97,65	98,27	98,25

Sumber : BPS, Susenas 2016 dan 2017

lama sekolah sebanyak 6 tahun, tamat SLTP adalah 9 tahun dan seterusnya. Perhitungan lama sekolah tidak memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan.

Angka lama sekolah dapat juga digunakan untuk monitoring pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun yang dicanangkan oleh pemerintah. Artinya untuk melewati target program tersebut maka rata-rata lama sekolah harus sudah mencapai 9 tahun.

Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 sebesar 8,72 tahun. Dengan kata lain penduduk di Provinsi Sumatera Barat baru bisa menikmati pendidikan rata-rata sampai kelas 3 SLTP. Angka tersebut sudah mendekati target Program Wajib Belajar yang dicanangkan pemerintah yaitu menyelesaikan pendidikan dasar selama 9 tahun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 mengalami kenaikan, dimana tahun 2016 sebesar 8,59 tahun atau setara dengan tingkat pendidikan kelas 3 SLTP.

Tabel 3.2 Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Umur 25 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2016 dan 2017

Jenis Kelamin	Tahun	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	8,72	8,86
Perempuan	8,50	8,60
Laki-Laki +Perempuan	8,59	8,72

Sumber : IPM dan IPG , 2016 dan 2017

Jika dilihat menurut jenis kelamin, pola peningkatan angka rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan relatif sama. Pada tahun 2017, angka rata-rata lama sekolah laki-laki sebesar 8,86 tahun dan rata-rata lama

sekolah perempuan sebesar 8,60 tahun atau setara dengan kelas 2 SLTP. Meskipun rata-rata lama sekolah perempuan lebih rendah dari laki-laki, namun perbedaan capaian rata-rata lama sekolah antara laki-laki dan perempuan selama tahun 2016 dan 2017 menunjukkan kecenderungan yang mengecil meskipun tidak terlalu signifikan. Hal ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk lebih mengupayakan peningkatan pembangunan pendidikan masyarakat khususnya bagi perempuan.

3.3 TINGKAT PENDIDIKAN

Pendidikan sangat erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Di Sumatera Barat, kesempatan untuk memperoleh pendidikan antara penduduk yang tinggal di perkotaan dan perdesaan masih terdapat kesenjangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka kesenjangan antara penduduk di perkotaan dan perdesaan juga semakin tinggi. Pada tahun 2017, persentase penduduk perdesaan yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat, melebihi penduduk di perkotaan. Namun, untuk jenjang pendidikan SMA/ sederajat dan perguruan tinggi, penduduk diperkotaan memperoleh ijazah melebihi penduduk di perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum meratanya tingkat pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat terutama yang tinggal diperdesaan.

Di wilayah perdesaan, pada tahun 2017 penduduknya paling banyak memiliki tingkat pendidikan SD yakni sebanyak 24,87 persen. Sedangkan di perkotaan, penduduknya paling banyak memiliki ijazah SMA, yakni 38,30 persen. Pada tahun 2017, persentase penduduk yang memperoleh ijazah SD/ sederajat dan SMA/ sederajat mengalami penurunan dibanding tahun 2016, yakni sebanyak 54,32 persen tahun 2016 menjadi 49,43 persen tahun 2017. Sedangkan untuk jenjang

Tabel 3.3 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2016 dan 2017

Tingkat Pendidikan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/Belum Punya Ijazah	10,51	9,38	24,24	23,90	18,50	17,72
SD/ sederajat	17,52	14,84	28,71	24,87	24,30	20,60
S M P/ sederajat	17,47	21,16	17,35	23,06	17,40	22,25
SMA/ sederajat	38,83	38,30	23,70	21,80	30,02	28,83
Diploma I/II	0,73	1,01	0,39	0,50	0,53	0,72
Diploma III/ Sarjana Muda	3,63	3,10	1,04	1,43	2,12	2,14
Diploma IV/ S1/ S2/ S3	11,31	12,20	4,56	4,44	7,38	7,74
SMP +	72,29	75,78	47,05	51,23	57,20	61,68

Sumber : BPS, Susenas 2016 dan 2017

pendidikan SMP, DI/II/III dan DIV/S1/S2/S3 mengalami peningkatan, dari 27,43 persen tahun 2016 menjadi 32,85 persen tahun 2017.

3.4 TINGKAT PARTISIPASI SEKOLAH

Salah satu tujuan dari SDGs adalah menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang sampai dengan tahun 2030, baik laki-laki maupun perempuan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian SDGs adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) yaitu melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

Pada tahun 2017 masih terdapat sekitar 0,57 persen penduduk usia 7-12 tahun yang belum mengenyam pendidikan atau tidak bersekolah. Sedangkan pada kelompok usia 13-15 tahun masih cukup besar bila dibandingkan dengan kelompok umur 7-12 tahun yaitu sebesar 3,71 persen penduduk yang belum mengenyam pendidikan. Masih rendahnya APS usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun menunjukkan bahwa penerapan program wajib belajar 9 tahun masih belum efektif.

Hal tersebut bisa jadi disebabkan karena masih adanya kasus anak putus sekolah. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, ada sebanyak 0,69 persen anak laki-laki usia 7-12 tahun yang belum mengenyam pendidikan setara SD, sementara anak berjenis kelamin perempuan sebesar 0,30 persen. Sedangkan untuk anak laki-laki usia 13-15 tahun yang belum mengenyam pendidikan setara SMP sebanyak 5,48 persen dan yang perempuan 1,97 persen. Ini berarti proporsi anak laki-laki yang belum mengenyam pendidikan baik tingkat SD maupun SMP lebih besar dari pada anak perempuan atau dengan kata lain pada kelompok umur 13-15 tahun APS perempuan lebih tinggi dibandingkan APS laki-laki. Hal yang sama juga terjadi pada anak usia 16-18 tahun. Jika ditelusuri berdasarkan wilayah tempat tinggal anak, berdasarkan tabel 3.5 ada sekitar 0,27 persen anak usia 7-12 tahun yang tinggal di perkotaan belum mengenyam pendidikan tingkat SD, sedangkan di wilayah perdesaan terdapat 0,66 persen belum mengenyam pendidikan tingkat SD. Untuk kelompok usia 13-15 tahun yang

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2016 dan 2017

Kelompok Umur, Jenis Kelamin	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Usia 7-12 tahun						
Laki-laki	99,08	99,76	99,47	99,00	99,32	99,31
Perempuan	99,90	99,71	99,32	99,69	99,54	99,70
Laki-laki + Perempuan	99,48	99,73	99,40	99,34	99,43	99,50
- Usia 13-15 tahun						
Laki-laki	96,04	94,20	93,65	94,72	94,67	94,52
Perempuan	99,10	97,95	97,11	98,09	97,86	98,03
Laki-laki + Perempuan	97,38	96,11	95,34	96,40	96,17	96,29
- Usia 16-18 tahun						
Laki-laki	86,18	87,40	73,52	74,96	78,66	80,16
Perempuan	90,18	90,51	83,15	82,04	86,31	85,61
Laki-laki + Perempuan	88,36	88,95	78,32	78,46	82,62	82,86

Sumber : BPS Susenas 2016 dan 2017

tinggal diperkotaan dan belum mengenyam pendidikan tingkat SMP ada sebanyak 3,89 persen dan yang tinggal di perdesaan sebanyak 3,60 persen. Sementara untuk kelompok usia 16-18 tahun ada sebanyak 11,05 persen anak perkotaan dan 21,54 persen anak perdesaan belum mengenyam pendidikan tingkat SMA. Dari ketiga kelompok usia tersebut, anak yang belum mengenyam pendidikan baik tingkat SD, SMP maupun SMA paling banyak adalah anak yang tinggal di wilayah perdesaan atau dengan kata lain APS di wilayah perkotaan lebih tinggi dibanding wilayah perdesaan untuk ketiga kelompok usia. Penjelasan yang memungkinkan dari hasil tersebut adalah karena kurangnya fasilitas sekolah di perdesaan dan lebih banyaknya penduduk miskin di perdesaan.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Peningkatan APS diikuti pula dengan peningkatan APM pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan menyekolahkan anak-anak mereka dengan tepat waktu. Secara umum APM SD sebesar 98,64 persen meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 98,23 persen. APM SMP juga mengalami peningkatan dari 76,19 persen pada tahun 2016 menjadi 76,47 persen pada tahun 2017. Sedangkan untuk tingkat SMA meningkat dari 67,12 persen naik menjadi 67,30 persen. Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, APM SD untuk perempuan lebih besar dibandingkan APM SD untuk laki-laki, APM SD untuk laki-laki tercatat sebesar 98,44 persen pada tahun 2017, sedangkan APM SD untuk perempuan sebesar 98,85 persen, sama

halnya dengan APM SMP dan APM SMA. APM perempuan juga lebih besar bila dibandingkan dengan APM laki-laki, APM SMP perempuan tercatat sebesar 79,42 persen, sementara APM SMP laki-laki sebesar 73,47 persen pada tahun 2017. Begitu pula pada jenjang pendidikan SMA, APM perempuan juga menunjukkan kondisi yang lebih tinggi dari pada laki-laki, APM perempuan tercatat sebesar 72,57 persen berbanding 62,12 persen APM laki-laki. Jika dilihat berdasarkan wilayah tempat tinggal, APM SD yang tinggal di perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan APM SD yang tinggal di perkotaan, APM SD di perdesaan tercatat sebesar 99,25 persen pada tahun 2017, sedangkan APM SD yang tinggal di perkotaan sebesar 97,73 persen, berbeda halnya dengan APM SMP dan APM SMA. APM SMP yang tinggal perkotaan tercatat sebesar 76,52 persen, sementara APM SMP di perdesaan sebesar 76,44 persen pada tahun 2017. Begitu pula pada jenjang pendidikan SMA, APM SMA yang tinggal diperkotaan juga menunjukkan kondisi yang lebih tinggi dari pada yang tinggal di perdesaan, APM SMA di perkotaan tercatat sebesar 73,50 persen berbanding 62,82 persen APM SMA di perdesaan.

Tabel 3.5 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2016 dan 2017

Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- SD/Sederajat						
Laki-laki	97,10	97,88	98,47	98,83	97,96	98,44
Perempuan	99,10	97,55	98,14	99,69	98,51	98,85
Laki-laki + Perempuan	98,08	97,73	98,31	99,25	98,23	98,64
- SMP/Sederajat						
Laki-laki	76,54	74,35	71,51	72,91	73,66	73,47
Perempuan	81,70	78,59	77,44	79,98	79,06	79,42
Laki-laki + Perempuan	78,80	76,52	74,41	76,44	76,19	76,47
- SMA/Sederajat						
Laki-laki	68,09	70,04	53,89	56,44	59,65	62,12
Perempuan	79,00	76,99	69,88	69,36	74,06	72,57
Laki-laki + Perempuan	74,02	73,50	61,94	62,82	67,12	67,30

Sumber: BPS Susenas 2016 dan 2017

Salah satu indikator yang dapat

digunakan untuk mengukur pemerataan dan perluasan akses pendidikan adalah Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid-Kelas. Hal ini merupakan perbandingan antara jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio Murid-Guru dapat memberikan gambaran besarnya beban guru dalam mengajar, sehingga apabila Rasio Murid-Guru semakin tinggi maka semakin banyak siswa yang harus dididik oleh seorang guru. Sedangkan Rasio Murid-Kelas menggambarkan daya tampung siswa dalam satu kelas. Semakin tinggi Rasio Murid-Kelas, maka semakin banyak jumlah siswa dalam satu kelas. Keadaan ini berdampak pada suasana dan keberhasilan dalam kegiatan proses belajar mengajar.

Tabel 3.6 Perkembangan Rasio Murid-Guru, Guru-Sekolah dan Rasio Murid-Kelas, 2013/2014-2016/2017 di Sumatera Barat

Tahun	Rasio Murid-Guru			Rasio Murid-Kelas		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2013/2014	13	9	11	23	22	29
2014/2015	14	11	9	21	27	27
2015/2016	14	10	10	22	25	26
2016/2017	15	12	11	21	25	27

Sumber : BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2018

Selama kurun waktu 2013/2014 hingga 2016/2017 Rasio Murid-Guru SD menunjukkan angka cenderung meningkat, dimana pada tahun 2013/2014 Rasio Murid-Guru tercatat sebesar 13 meningkat menjadi 15 pada tahun 2016/2017. Pada jenjang pendidikan SMP Rasio Murid-Guru sebesar 12 pada tahun 2016/2017 sebesar 12 atau meningkat bila dibandingkan tahun 2013/2014 yaitu sebesar 9. Sementara pada jenjang pendidikan SMA Rasio Murid-Guru pada tahun 2013/2014 dan 2016/2017 masih tercatat 11. Dari ketiga jenjang pendidikan, baik SD, SMP dan SMA, rasio murid-guru mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah murid semakin bertambah namun jumlah guru semakin berkurang.

pendidikan SD sebesar 21, untuk jenjang pendidikan SMP sebesar 25 dan SMA tercatat sebesar 27. Jika dibandingkan tahun ajaran 2013/2014, rasio murid-kelas pada semua jenjang pendidikan memperlihatkan adanya kecenderungan meningkat. Hal ini berarti setiap tahun jumlah murid bertambah namun jumlah kelas masih terbatas.

Indikator selanjutnya adalah Rasio Murid-Kelas, dimana pada tahun ajaran 2016/2017 rasio murid kelas pada jenjang

BAB

4

KETENAGAKERJAAN

<https://sumbar.bps.go.id>

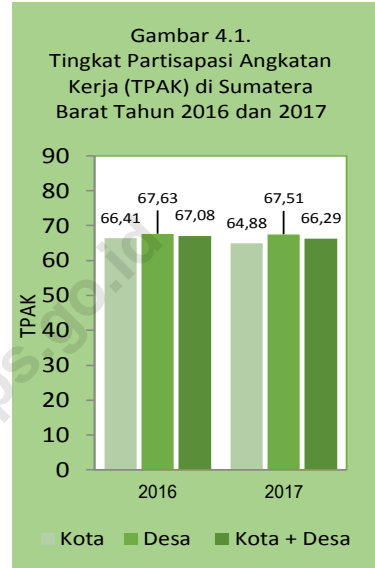
4. KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting untuk menunjukkan kesejahteraan masyarakat, dengan indikator keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan diantaranya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK menggambarkan perbandingan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang termasuk ke dalam angkatan kerja dibandingkan jumlah penduduk 15 tahun ke atas. TPT menggambarkan perbandingan jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha dan penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja terhadap angkatan kerja. Sumber data yang digunakan adalah dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

4.1 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) DAN TINGKAT PENGANGGURAN (TPT)

TPAK Sumatera Barat tahun 2017 adalah 66,29 persen dan angka ini naik cukup tajam dari tahun 2016 yaitu 67,08 persen. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPAK daerah perdesaan lebih tinggi daripada daerah perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang berpotensi secara ekonomis untuk melakukan pekerjaan lebih banyak di daerah perdesaan. Jika dibandingkan menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dari TPAK perempuan sekitar 1,5 kali lipat. Untuk tahun 2016, TPAK laki-laki adalah 81,10 persen dan untuk perempuan 53,48 persen. Tahun 2017, baik TPAK laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan. TPAK laki-laki menjadi 80,05 persen sedangkan TPAK perempuan naik secara signifikan menjadi 52,93 persen.

TPT Sumatera Barat naik dari 5,09 persen pada tahun 2016 menjadi 5,58 persen tahun 2017. Hal ini mengindikasikan kondisi ekonomi secara makro kurang menyerap tenaga kerja lebih baik. Bila dibandingkan menurut daerah



Sumber : BPS Sakernas Agustus 2016 dan 2017

Tabel 4.1 TPAK dan TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat, Tahun 2016-2017

Daerah/Jenis Kelamin	TPAK		TPT	
	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	66,41	64,88	6,20	6,63
Perdesaan	67,63	67,51	4,17	4,71
Perkotaan + Perdesaan	67,08	66,29	5,09	5,58
Laki-laki	81,10	80,05	4,93	4,96
Perempuan	53,48	52,93	5,32	6,50
Laki-Laki + Perempuan	67,08	66,29	5,09	5,58

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2016 dan 2017

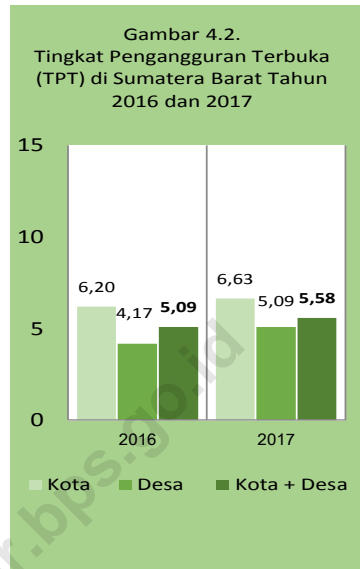
tempat tinggal, TPT di daerah perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan perkotaan. Hal ini disebabkan karena sektor potensial yang menjadi mata pencarian mayoritas penduduk Sumatera Barat terdapat di perdesaan, sehingga pengangguran di perdesaan menjadi lebih sedikit. Jika dibandingkan menurut jenis kelamin, TPT perempuan selalu lebih tinggi dari pada TPT laki-laki.

4.2 TINGKAT PENGANGGURAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN

TPT menurut tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 4.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa TPT cenderung tinggi untuk mereka yang mempunyai pendidikan tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi lebih sulit mendapatkan pekerjaan dibandingkan penyerapan tenaga kerja dengan pendidikan yang lebih rendah. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin sempit lapangan pekerjaan, karena jenis pekerjaan untuk pendidikan lebih tinggi, lebih spesifik dan lebih membutuhkan keahlian tertentu, sehingga tidak membutuhkan pekerja dalam jumlah besar. Berbeda dengan jenis pekerjaan untuk angkatan kerja yang berpendidikan rendah, yang tidak terlalu membutuhkan keterampilan khusus.

Melihat rendahnya TPT di kategori tingkat pendidikan dasar/rendah (SLTP kebawah), maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar penganggur di Sumatera Barat merupakan pengangguran terdidik.

Apabila dilihat dari Gambar 4.3, TPT dengan pendidikan minimal SMA di tahun 2016 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini menunjukkan adanya penurunan penyerapan tenaga kerja untuk pendidikan



Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2016 dan 2017

Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2016-2017

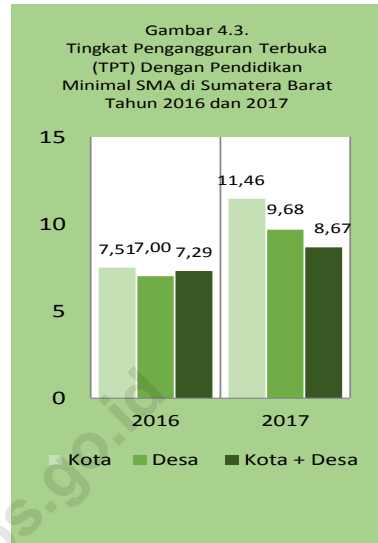
Tingkat Pendidikan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+ Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/Belum pernah sekolah atau Tidak/Belum Tamat SD	2,45	2,68	2,30	5,67	2,35	3,13
SD	5,64	5,44	1,49	2,65	2,87	4,32
SMP	4,92	6,26	4,08	4,86	4,43	5,03
SMA Umum	9,12	11,45	7,12	12,09	8,17	9,24
SMA Kejuruan	7,07	5,34	8,00	9,06	7,46	8,80
Diploma/Akademi	2,11	10,34	12,45	10,96	6,71	7,45
Universitas	7,55	8,10	3,04	3,78	5,76	4,58
Total	6,20	8,79	4,17	6,34	5,09	4,50
SMA +	7,51	11,46	7,00	9,68	7,29	8,67

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2016 dan 2017

minimal SMA di tahun 2017 daripada tahun sebelumnya.

4.3 LAPANGAN USAHA DAN STATUS PEKERJAAN

Persentase pekerja di Sumatera Barat masih didominasi oleh kontribusi sektor pertanian yaitu sebesar 35,17 persen tahun 2017 dan 36,44 persen pada tahun 2016. Jika dibedakan menurut daerah tempat tinggal, daerah perdesaan paling besar menyerap tenaga kerja sektor pertanian yaitu sebesar 49,19 persen tahun 2016 dan 50,79 persen di tahun 2017.



Tabel 4.3 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2016 dan 2017
Kelompok Lapangan Pekerjaan Utama dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2016-2017

Lapangan Pekerjaan Utama (1)	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	2016 (2)	2017 (3)	2016 (4)	2017 (5)	2016 (6)	2017 (7)
Pertanian	20,67	16,13	49,19	50,79	36,44	35,17
Industri	7,99	9,46	9,41	7,76	8,78	8,53
Perdagangan	28,94	31,75	16,46	18,42	22,04	24,43
Jasa	23,62	24,73	12,86	12,40	17,67	17,96
Lainnya	18,77	17,93	12,07	10,63	15,07	13,91

Sumber : Sakernas Agustus 2016,2017

Catatan:

- Pertanian termasuk kehutanan, perburuan, peternakan dan perikanan
- Perdagangan meliputi perdagangan besar, eceran, rumah makan, hotel
- Jasa meliputi jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan
- Lainnya termasuk pertambangan, penggalian, listrik, gas dan air, bangunan, angkutan, pergudangan, komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan

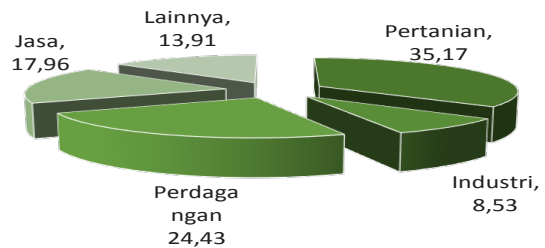
Selama tahun 2016-2017 lapangan pekerjaan utama di daerah perkotaan adalah bidang perdagangan, yaitu berturut-turut sebesar 28,94 persen dan 31,75 persen. Disamping perdagangan, sektor jasa juga mendominasi daerah perkotaan. Pada tahun 2016 nilainya menurun dari 23,62 persen menjadi 24,73 persen pada tahun 2017.

Bila dilihat menurut status pekerjaan, mayoritas pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai yang mencapai 31,75 persen di tahun 2017. Di daerah perkotaan pekerja sebagai buruh/karyawan pada tahun 2016 dan 2017 berkisar antara 42 hingga 44 persen. Untuk daerah perdesaan pekerja sebagai buruh/karyawan di kisaran 26 persen pada tahun 2016 dan di sekitar 21 persen di tahun 2017. Perlu dicermati pada status pekerjaan di daerah perdesaan di tahun 2016 didominasi status buruh/karyawan/pegawai. Namun, di tahun 2017 terjadi pergeseran, status pekerjaan berusaha sendiri dan status berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja tidak dibayar menjadi dominasi utama seperti halnya di daerah perkotaan.

4.4 JUMLAH JAM KERJA

Fokus ketenagakerjaan tidak hanya pada besarnya angka pengangguran tetapi juga pada produktivitas tenaga kerja melalui jumlah jam kerja. Asumsi yang berlaku adalah semakin banyak jam kerja maka pekerja akan semakin produktif. Konsep jumlah jam kerja yang digunakan adalah lama waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan yang dilakukan (tidak termasuk jam istirahat dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) selama seminggu yang lalu. Bila pekerja bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan disebut Setengah Pengangguran.

Gambar 4.4.
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (persen) di Sumatera Barat Tahun 2017



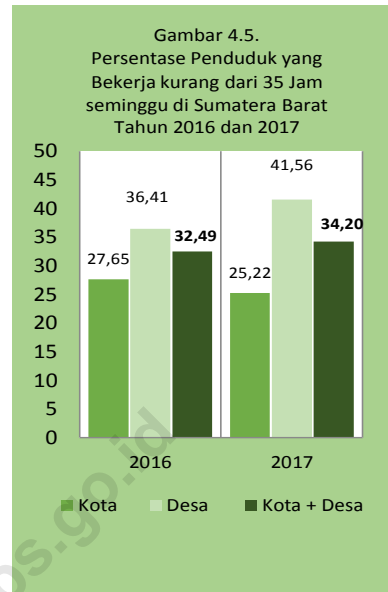
Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2016 dan 2017

Tabel 4.4 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2016-2017

Status Pekerjaan	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berusaha sendiri	17,07	23,23	17,88	22,36	17,52	22,75
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja tidak dibayar	12,96	10,37	20,56	20,38	17,16	15,95
Bekerja dibantu buruh tetap/buruh dibayar	5,98	4,33	3,53	3,47	4,63	3,85
Buruh/karyawan/pegawai	42,91	44,87	26,03	21,10	33,57	31,75
Pekerja bebas di pertanian	2,21	3,43	9,26	11,17	6,11	7,63
Pekerja bebas di non pertanian	6,21	4,77	5,52	6,31	5,82	5,62
Pekerja keluarga	12,67	9,00	17,21	15,21	15,18	12,45

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2016 dan 2017

Pada Tabel 4.5 terlihat penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja normal adalah 32,49 persen tahun 2016 dan mengalami kenaikan di tahun 2017 yaitu menjadi 34,20 persen. Sementara itu, penduduk yang bekerja di atas 60 jam adalah 12,44 persen tahun 2016, naik menjadi 14,16 persen pada tahun 2017. Penduduk di daerah perdesaan lebih banyak yang bekerja kurang dari jam kerja normal, baik di tahun 2016 maupun 2017. Di tahun 2017 persentasenya meningkat menjadi 41,56 persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 36,41 persen.



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2016 dan 2017

Tabel 4.5 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2016-2017

Kelompok Jam Kerja	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 ¹	2,38	2,35	2,56	2,19	2,48	2,26
1 – 9	2,74	3,12	3,48	5,06	3,15	4,17
10 – 24	12,67	11,96	19,04	20,35	16,19	16,57
25 – 34	12,24	10,14	13,89	16,15	13,15	13,46
35 – 44	25,38	23,46	27,71	24,09	26,67	23,81
45 – 59	26,77	29,02	25,23	22,76	25,92	25,57
60 +	17,83	19,95	8,09	9,40	12,44	14,16

¹ sementara tidak bekerja

Sumber : BPS Sakernas Agustus 2016,2017

Dengan melihat jam kerja dapat diperoleh Tingkat Setengah Pengangguran (TSP). TSP dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal dengan jumlah angkatan kerja. Tingginya TSP mengindikasikan bahwa kurang optimalnya pemanfaatan tenaga kerja yang ada. Dari Tabel 4.6, TSP Sumatera Barat pada tahun 2016 adalah 10,23 persen dan tahun 2017

sedikit meningkat menjadi 10,99 persen. Bila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TSP perdesaan lebih tinggi daripada daerah perkotaan.

Secara umum, hampir di semua kelompok umur mengalami penurunan di tahun 2017. Kecuali, untuk kelompok umur 20-24 tahun, 30-34 tahun, dan 35-39 tahun. Kenaikan di kelompok umur 30-34 tahun cukup signifikan yaitu sebanyak 12,50 persen, nilai ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya tercatat sebesar 7,02 persen

Tabel 4.6 Tingkat Setengah Pengangguran (TSP) Menurut Kelompok Umur di Sumatera Barat Tahun 2016-2017

Kelompok Umur	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15-19	9,90	9,93	19,28	19,58	14,80	12,12
20-24	11,96	19,24	18,55	15,69	15,10	19,15
25-29	13,61	12,58	19,44	12,93	16,56	13,10
30-34	6,91	12,58	12,50	13,67	9,92	12,22
35-39	7,38	9,99	6,73	13,09	7,02	12,50
40-44	5,80	10,21	11,38	9,72	8,91	7,07
45-49	8,07	9,77	7,93	8,80	8,00	7,38
50-54	6,45	6,57	9,95	6,27	8,49	5,36
55-59	4,91	4,05	5,78	5,82	5,42	5,24
60+	1,53	5,35	8,22	4,43	5,87	5,67
Sumatera Barat	8,26	10,24	11,85	11,43	10,23	10,99

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2016 dan 2017

4.5 UPAH/GAJI/PENDAPATAN BERSIH KERJA

Pendapatan bersih kerja adalah pendapatan bersih yang biasanya diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan/pegawai baik berupa uang atau barang yang dibayarkan oleh perusahaan/kantor/majikan. Pendapatan bersih yang dimaksud di sini adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan, iuran wajib, pajak penghasilan dan lain sebagainya oleh perusahaan/kantor/majikan.

Pada tabel 4.7 dihalaman berikut ini, terlihat bahwa rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih sebulan dari pekerja di Sumatera Barat mengalami peningkatan di tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 2,1 juta rupiah menjadi 2,7 juta rupiah.

Untuk pekerja dengan tingkat pendidikan universitas memiliki rata-rata pendapatan bersih yang lebih tinggi di

daerah perdesaan dibandingkan dengan yang tinggal di daerah perkotaan. Dapat dikatakan bahwa pekerja dengan pendidikan tinggi lebih 'dihargai' jika bekerja di daerah perdesaan.

Bila dilihat secara keseluruhan, rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih ini semakin meningkat seiring dengan meningkatnya level pendidikan yang ditamatkan oleh pekerja. Dengan demikian, kesempatan mengenyam pendidikan yang semakin tinggi akan memegang peranan penting untuk lebih menyejahterakan penduduk.

Pada tabel 4.8 berikut ini, memperlihatkan bahwa di Sumatera Barat terdapat kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini ditunjukkan di semua level pendidikan yang di tamatkan baik pada tahun 2016 maupun 2017 bahwa pekerja laki-laki berpenghasilan lebih tinggi daripada pekerja perempuan. Untuk pekerja laki-laki yang lulus universitas berpenghasilan lebih banyak 1,6 kali lipat dari pekerja perempuan dengan lulusan yang sama

Tabel 4.7 Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih Sebulan (rupiah) pekerja¹⁾ Menurut Pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat, Tahun 2016-2017

Tingkat Pendidikan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+ Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/Belum pernah sekolah	1.900.000	1.276.622	988.959	1.272.317	1.131.867	1.274.562
Tidak/Belum tamat SD	1.102.910	1.392.024	1.386.246	1.467.865	1.297.694	1.434.207
SD	1.531.516	1.637.738	1.278.781	1.688.563	1.356.403	1.666.573
SMP	1.559.688	1.801.162	1.697.112	1.980.037	1.634.848	1.918.092
SMA Umum	1.811.191	2.145.492	2.315.815	2.844.980	2.021.411	2.666.627
SMA Kejuruan	2.048.701	2.142.834	1.910.801	2.801.151	2.002.826	2.678.607
Diploma/Akademi	2.609.731	2.499.835	2.272.050	3.867.789	2.486.341	3.543.796
Universitas	3.331.932	2.901.586	3.428.015	4.988.252	3.370.934	4515.054
Sumatera Barat	2.146.690	2.034.007	1.960.844	3.031.176	2.054.536	2.742.621

¹⁾ Pekerja adalah Buruh/Karyawan/Pegawai, Pekerja Bebas

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2016 dan 2017

Tabel 4.8 Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih Sebulan (rupiah) pekerja¹⁾ Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat, Tahun 2016-2017

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki+ Perempuan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/Belum pernah sekolah	1.900.000	1.986.000.	988.959	1.224.869	1.131.867	1.213.749
Tidak/Belum tamat SD	1.482.134	1.76.657	778.283	978.970	1.297.694	1.478.492
SD	1.498.878	1.987.948	898.038	1.023.123	1.356.403	1.546.596
SMP	1.867.049	2.012.734	876.007	1.002.748	1.634.848	1.768.908
SMA Umum	2.228.439	2.437.689	1.399.913	1.498.483	2.021.411	2.456.697
SMA Kejuruan	2.204.886	2.395.768	1.487.781	1.685.748	2.002.826	2.115.643
Diploma/Akademi	2.868.880	2.993.890	2.386.761	2.567.758	2.486.341	2.765.367
Universitas	4.023.896	4.945.738	2.996.446	3.006.869	3.370.934	3.765.590
Sumatera Barat	2.129.963	2.506.982	1.922.074	2.324.647	2.054.536	2.134.543

¹⁾ Pekerja adalah Buruh/Karyawan/Pegawai, Pekerja Bebas

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2016 dan 2017

Untuk pekerja yang berpendidikan di bawah pendidikan dasar (maksimal SMP), kesenjangan pendapatan antara pekerja laki-laki maupun perempuan semakin besar. Hal ini dapat dikarenakan pekerjaan yang tersedia untuk pekerja berpendidikan rendah adalah pekerjaan kasar tanpa memerlukan keahlian khusus namun lebih banyak menggunakan tenaga besar. Sehingga lebih banyak pekerja laki-laki yang dibutuhkan.

Pada tabel 4.9 berikut, rata-rata upah perempuan di Sumatera Barat adalah 91,94 persen upah pekerja laki-laki. Untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, rata-rata upah perempuan adalah 63,29 persen upah pekerja pria, sementara di sektor non pertanian pekerja perempuan menerima 95,33 persen bayaran yang diterima oleh pekerja pria.

Tabel 4.9 Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih Sebulan (rupiah) pekerja¹⁾ Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2016-2017

Lapangan Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki+ Perempuan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.759.118	1.779.056	1.070.781	1.125.921	1.547.895	1.646.786
Pertambangan dan Penggalian	1.805.231	1.818.564	0	0	1.805.231	1.790.675
Perdagangan	1.760.109	1.887.432	707.767	604.674	1.401.607	1.897.098
Industri Pengolahan	1.692.794	1.720.876	2.256.383	2.138.463	1.928.679	1.99.980
Penggadaan Listrik dan Gas	2.882.951	2.912.254	0	0	2.882.951	2.345.743
Pengadaan Air dan pengelolaan sampah	1.881.568	1.002.675	0	1.114.632	1.881.568	1.897.043
Konstruksi	1.593.735	1.607.657	1.154.144	1.275.932	1.441.172	1.497.924
Perdagangan dan Reparasi	1.976.561	2.031.890	900.000	1.021.355	1.938.007	1.976.905
Transportasi dan Pergudangan	1.997.279	2.043.703	1.055.533	1.112.450	1.836.386	1.896.089
Informasi dan Komunikasi	2.032.184	2.150.856	838.732	789.389	1.664.635	1.768.956
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.263.739	3.897.076	2.553.707	2.697.678	2.987.451	2.909.098
Real Estate	0	1.004.982	1.700.000	1.700.980	1.700.000	1.750.453
Jasa Perusahaan	2.133.161	0	1.139.004	1.543.908	1.776.591	1.876.532
Administrasi Pemerintahan	3.402.615	3.611.763	2.638.438	2.797.546	3.094.207	3.012.213
Jasa Pendidikan	3.069.577	3.208.807	2.786.722	2.808.678	2.865.740	2.970.567
Jasa Kesehatan	3.367.636	3.987.562	2.438.434	2.654.638	2.765.034	2.898.907
Jasa lainnya	1.833.376	1.908.753	881.975	908.546	1.254.713	1.456.653
Sumatera Barat	2.129.963	2.215.320	1.922.074	2.036.712	2.054.536	2.143.721

¹⁾ Pekerja adalah Buruh/Karyawan/Pegawai, Pekerja Bebas

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2016 dan 2017

BAB

5

TARAF DAN POLA KONSUMSI

<https://sumbar.bps.go.id>

<https://sumbar.bps.go.id>



5. TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketersediaan pangan, budaya, tingkat pendapatan maupun lingkungan tempat tinggal. Ada pendapat yang mengelompokkan faktor yang menentukan konsumsi sebagai faktor ekonomi demografi dan non ekonomi. Pendapatan dan aset masuk dalam kelompok ekonomi yang akan menentukan daya beli masyarakat. Selanjutnya jenis kelamin, umur dan struktur rumah tangga merupakan variabel demografi yang dapat mempengaruhi pola konsumsi penduduk. Kondisi sosial budaya menentukan pola konsumsi penduduk melalui kecenderungan (selera) penduduk dalam kebutuhan makan maupun non makanan. Pengaruh tersebut melalui tata nilai yang hidup dalam budaya setempat yang disebut sebagai faktor non ekonomi.

5.1. PENGELUARAN RUMAH TANGGA

Ernst Engel seorang statistisi dari Jerman mengatakan bahwa persentase pendapatan yang dialokasikan untuk konsumsi makanan akan menurun seiring dengan peningkatan pendapatan. Elastisitas pendapatan terhadap permintaan makanan rendah (antara 0 dan 1), sebaliknya elastisitas untuk permintaan terhadap komoditas non makanan tinggi. Kecenderungan proporsi konsumsi makanan dan non makanan tersebut sering digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengilustrasikan kesejahteraan penduduk.

Tabel 5.1 menunjukkan pengeluaran rata-rata per kapita penduduk Sumatera Barat 2016-2017 dalam sebulan menurut jenis pengeluarannya. Pada tahun 2017 rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Sumatera Barat dalam sebulan adalah Rp1.053.803,48. Angka tersebut meningkat Dibandingkan tahun 2016 yang mencapai Rp985.024,53. Terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran per

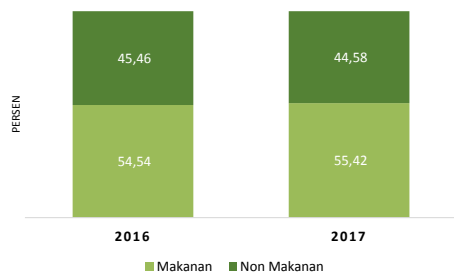
Tabel 5.1 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran dan Tipe Daerah di Sumatera Barat Tahun 2016-2017 (Rupiah)

Jenis Pengeluaran		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)		(2)	(3)	(4)
2016	Makanan	583.696,15	505.041,92	537.236,03
	Non Makanan	610.624,71	334.952,69	447.788,50
	Total	1.194.320,86	839.994,61	985.024,53
2017	Makanan	639.600,32	544.680,97	584.045,24
	Non Makanan	625.397,35	359.478,13	469.758,24
	Total	1.264.997,66	904.159,10	1.053.803,48

Sumber: BPS, Susenas 2016 dan 2017

kapita dan persentase pengeluaran makanan mengalami perubahan dalam kurun waktu 2016-2017. Persentase pengeluaran makanan tahun 2017 sekitar 55,54 persen dari total pengeluaran dan 54,54 persen pada tahun 2016.

Gambar 5.1. Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Sumatera Barat, Tahun 2016 dan 2017

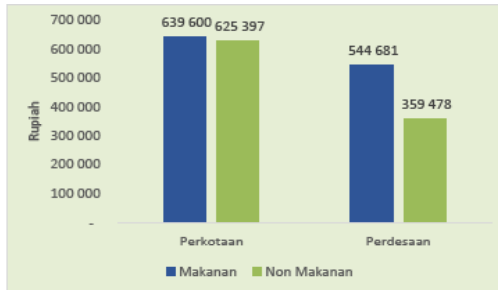


Sumber: BPS, Susenas 2016 dan 2017

Proporsi konsumsi makanan dan non makanan berbanding terbalik antara daerah perkotaan dan perdesaan. Di daerah perkotaan proporsi pengeluaran makanan lebih rendah dibandingkan proporsi pengeluaran non makanan. Sementara itu, untuk daerah perdesaan proporsi pengeluaran makanan lebih tinggi daripada daerah perkotaan yaitu sekitar 60,24 persen. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa tingkat pengeluaran

daerah perdesaan lebih rendah daripada daerah perkotaan dan masih memfokuskan pengeluarannya untuk pemenuhan kebutuhan makanan.

Gambar 5.2. Rata-Rata Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Perkapita Sebulan Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2017



Sumber: BPS, Susenas 2017

Tabel 5.2 menunjukkan struktur pengeluaran penduduk Sumatera Barat berdasarkan kelompok komoditas makanan dan non makanan. Secara umum struktur pengeluaran tidak banyak perubahan antara 2016 dan 2017 kecuali pada sub komponen non makanan pajak pungutan & asuransi serta keperluan pesta & upacara/ kenduri. Pada tahun 2017 terjadi pergeseran struktur antara sub komponen pengeluaran tersebut. Pengeluaran rumah tangga untuk komoditas

Tabel 5.2 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Barang di Sumatera Barat Tahun 2016 - 2017

Kelompok Barang	2016		2017		% Perubahan
	Nominal (Rp)	Proporsi (%)	Nominal (Rp)	Proporsi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Makanan	537.236,03	54,54	584.045,24	55,42	8,71
Non makanan	447.788,50	45,46	469.758,24	44,58	4,91
Perumahan & Fasilitas Rumah Tangga	206.253,24	20,94	204.800,20	19,43	-0,70
Aneka Barang & Jasa	112.613,26	11,43	115.478,18	10,96	2,54
Pakaian Alas kaki & tutup kepala	42.070,20	4,27	43.362,35	4,11	3,07
Barang Tahan Lama	50.126,66	5,09	61.280,32	5,82	22,25
Pajak Pungutan & Asuransi	17.625,57	1,79	28.523,64	2,71	61,83
Keperluan pesta & Upacara/ Kenduri	19.099,56	1,94	16.313,54	1,55	-14,59
Jumlah	985.024,53	100,00	1.053.803,48	100,00	6,98

Sumber: BPS, Susenas 2016 dan 2017

perumahan serta aneka barang dan jasa berkontribusi lebih dari 70 persen total pengeluaran non makanan. Jika dilihat dari pertumbuhannya maka kelompok pajak

pungutan & asuransi memiliki pertumbuhan yang paling tinggi yaitu sebesar 61,83 persen. Komoditas yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya adalah keperluan pesta & upacara/ kenduri serta perumahan & fasilitas rumah tangga. Sub komponen pengeluaran keperluan pesta & upacara/ kenduri mengalami penurunan sebesar 14,59 persen, diikuti dengan sub komponen pengeluaran perumahan & fasilitas rumah tangga mengalami penurunan sebesar 0,70 persen.

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok makanan dan non makanan meningkat sebesar 6,98 persen. Jika dilihat rinciannya, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok makanan penduduk Sumatera Barat pada tahun 2017 adalah Rp584.045,24. Jumlah ini meningkat 8,71 persen dari tahun sebelumnya. Jika dilihat dari pengeluaran non makanan, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Sumatera Barat pada tahun 2017 adalah Rp469.758,24. Jumlah ini meningkat 4,91 persen dari tahun sebelumnya. Jika dilihat dari strukturnya, proporsi pengeluaran untuk kelompok makanan mengalami peningkatan dari tahun 2016. Pada tahun 2016 proporsi pengeluaran untuk kelompok makanan yaitu sebesar 54,54 persen. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan menjadi 55,42 persen.

Pengeluaran terbesar untuk kelompok pengeluaran non makanan pada tahun 2017 adalah pada kelompok pengeluaran perumahan & fasilitas rumah tangga yaitu sebesar 19,43 persen dari total pengeluaran. Pengeluaran tertinggi berikutnya adalah pada kelompok pengeluaran aneka barang & jasa yaitu sebesar 10,96 persen.

Pada tahun 2017 di Sumatera Barat

Tabel 5.3 Rata-Rata Pengeluaran untuk Makanan per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Pengeluaran dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2016 dan 2017 (Rupiah)

Golongan Pengeluaran	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
150 000-199 999	-	-	-	143.737	-	143.737
200 000 – 299 999	177.177	267.452	194.567	274.306	192.777	196.120
300 000 – 499 999	276.879	433.088	286.829	424.496	284.109	288.938
500 000 – 749 999	374.450	625.636	411.602	620.412	400.115	406.460
750 000 – 999 999	512.570	869.352	561.397	865.020	541.063	548.238
1 000 000-1 499 999	639.150	1.221.644	696.721	1.198.116	667.459	712.752
≥ 1 500 000	972.006	2.362.280	1.076.798	2.295.404	1.005.053	1.000.118
Rata-Rata Perkapita	583.696	639.600	505.042	544.681	537.236	584.045

Sumber: BPS, Susenas 2016 dan 2017

kembali terdapat kelompok pengeluaran kurang dari Rp200.000. Hal ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 sudah tidak ada masyarakat pada kelompok pengeluaran ini. Jika dilihat dari jenis wilayahnya, kelompok ini ada pada daerah perdesaan. Pada tahun 2017 di daerah perdesaan pada kelompok pengeluaran perkapita kurang dari Rp200.000,00 perkapita per bulan. Sebesar 77,09 persen pengeluarannya digunakan untuk komoditas makanan. Kondisi ini berbeda dengan daerah perkotaan. Di daerah perkotaan pada tahun 2016 dan 2017 tidak ada pengeluaran perkapita sebulan yang kurang dari Rp200.000,00 per bulan. Pada kelompok pengeluaran perkapita sebulan pada interval Rp200.000,00 – Rp299.000,00 secara umum di Sumatera Barat rata-rata pengeluaran untuk makanan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kondisi ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Pada golongan pengeluaran Rp300.000,00 – Rp499.000,00 di Sumatera Barat mengalami peningkatan untuk pengeluaran makanan dibanding tahun sebelumnya,

begitu juga di daerah perdesaan.

Pada golongan pengeluaran lebih dari Rp1.500.000,00 perkapita perbulannya secara umum di Sumatera Barat mengalami peningkatan di pengeluaran makanannya. Hal ini berlaku untuk penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dan perdesaan.

Secara rata-rata perkapita, pada tahun 2017 pengeluaran untuk makanan di Sumatera Barat sebesar Rp584.045,00. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya baik di daerah perdesaan maupun perkotaan.

Secara umum, pada tahun 2017 rata-rata pengeluaran perkapita untuk non makanan di Sumatera Barat sebesar Rp469.758,00. Sebesar 45 persen pengeluaran perkapita sebulan masyarakat Sumatera Barat untuk non makanan. Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini terjadi baik pada daerah

Tabel 5.4 Rata-Rata Pengeluaran untuk Non Makanan per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Pengeluaran dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2016 dan 2017 (Rupiah)

Golongan Pengeluaran	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
150 000-199 999	-	-	-	42.722	-	42.722
200 000 – 299 999	106.539	102.843	84.856	76.360	87.088	77.816
300 000 – 499 999	153.501	152.557	134.732	132.031	139.863	138.098
500 000 – 749 999	228.596	237.863	207.133	204.557	213.746	215.700
750 000 – 999 999	352.950	350.566	316.122	300.518	331.459	318.324
1 000 000-1 499 999	555.517	531.096	493.388	468.296	524.966	495.590
≥ 1 500 000	1.553.182	1.360.382	1.317.964	1.299.572	1.479.004	1.342.538
Rata-Rata Perkapita	610.625	625.397	334.953	359.478	447.789	469.758

Sumber : BPS, Susenas 2016 dan 2017

perkotaan maupun pedesaan.

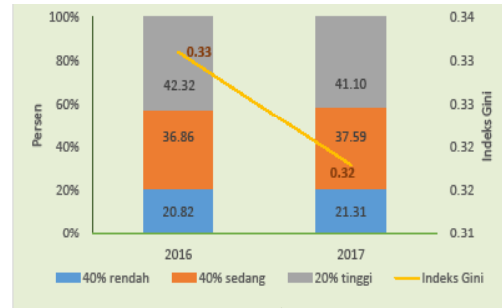
Jika dilihat secara rinci per golongan pengeluaran terjadi penurunan hampir disemua golongan pengeluaran. Peningkatan pengeluaran perkapita untuk non makanan hanya terjadi pada golongan pengeluaran Rp500.000 - Rp749.999 di perkotaan. Secara rata-rata, perkembangan pengeluaran perkapita untuk non makanan memperlihatkan adanya peningkatan. Hal ini dipicu oleh peningkatan masyarakat golongan pengeluaran Rp500.000 - Rp749.999 yang merupakan mayoritas penduduk di Sumatera Barat. Pada tahun 2017 terdapat 29,37 persen masyarakat berada pada golongan pengeluaran ini.

5.2. DISTRIBUSI PENDAPATAN

Salah satu ukuran ketimpangan yang sangat populer dan banyak digunakan adalah Indeks Gini. Koefisien Indeks Gini dihitung berdasarkan Kurva *Lorenz*, yaitu kurva yang menghubungkan frekuensi kumulatif distribusi pendapatan atau pengeluaran dengan distribusi seragam (*uniform*) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini mempunyai rentang dari 0 sampai 1. Jika terjadi pemerataan yang sempurna Indeks Gini akan bernilai 0. Sebaliknya akan terjadi ketimpangan sempurna apabila Indeks Gini bernilai 1.

Kemudian Bank Dunia juga membuat kriteria distribusi pendapatan untuk menggambarkan ketimpangan. Pada kriteria Bank Dunia penduduk digolongkan menjadi tiga kelas, yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Penghitungan Indeks Gini dan kriteria Bank Dunia pada ulasan ini menggunakan data pengeluaran. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa data pengeluaran lebih teliti daripada data pendapatan dan data pengeluaran dapat digunakan sebagai

Gambar 5.3 Distribusi Pengeluaran Penduduk dan Indeks Gini di Sumatera Barat Tahun 2016-2017



Sumber: BPS, Susenas 2016 dan 2017

pendekatan (*proxy*) dari pendapatan.

Dari gambar 5.3 dapat diketahui bahwa di Sumatera Barat pada tahun 2017 terjadi penurunan indeks gini. Artinya ketimpangan pendapatan yang ada di Sumatera Barat menurun. Jika dilihat lebih dalam terjadi peningkatan pengeluaran pada penduduk berpendapatan rendah dan berpendapatan sedang, namun terjadi penurunan pada kelompok penduduk berpendapatan tinggi.

Tabel 5.5 menyajikan distribusi pengeluaran penduduk dan Indeks Gini di Sumatera Barat tahun 2015 hingga 2017.

Tabel. 5.5 Distribusi Pengeluaran Penduduk Perkapita dan Indeks Gini di Sumatera Barat Tahun 2015-2017

Tahun	40% berpengeluaran rendah	40% berpengeluaran sedang	20% berpengeluaran tinggi	Indeks Gini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015	20,50	36,18	43,33	0,34
2016	20,82	36,86	42,32	0,33
2017	21,31	37,59	41,10	0,32

Sumber: BPS, Susenas 2016 dan 2017

Pada tahun 2017, 40 persen penduduk yang berpengeluaran rendah menerima 21,31 persen dari seluruh pendapatan. Berdasarkan indikator ketimpangan Bank Dunia, angka tersebut masih dalam tingkat ketimpangan yang rendah karena kelompok tersebut menerima lebih dari 17 persen dari seluruh pendapatan. Jika melihat tahun 2015 hingga

2017 terlihat bahwa penduduk yang termasuk 40 persen berpengeluaran rendah mengalami peningkatan, yaitu dari 20,50 persen menjadi 20,82 persen hingga 21,31 persen di tahun 2017. Untuk kelompok 40 persen berpengeluaran sedang juga mengalami peningkatan, yaitu dari 36,18 persen tahun 2015 menjadi 37,59 persen pada tahun 2017.

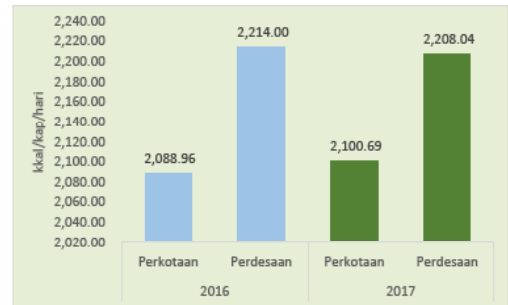
Penurunan persentase pengeluaran terjadi pada kelompok 20 persen berpengeluaran tinggi, yaitu dari 43,33 persen di tahun 2015 menjadi 41,10 persen pada tahun 2017. Dengan peningkatan persentase penduduk di kelompok 40 persen pengeluaran rendah dan kelompok penduduk di kelompok 40 persen pengeluaran sedang, hal ini menggambarkan bahwa distribusi pengeluaran penduduk tahun 2017 secara umum cenderung membaik dibanding tahun 2016. Hal ini sejalan dengan turunnya Indeks Gini dari tahun 2016 sebesar 0,33 menjadi 0,32 di tahun 2017.

5.3. KONSUMSI ENERGI DAN PROTEIN

Data Susenas 2016-2017 Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa terjadi peningkatan konsumsi energi per kapita per hari di daerah perkotaan, namun terjadi penurunan di daerah perdesaan. Meskipun demikian, konsumsi energi di daerah perdesaan tetap lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Hal ini terjadi pada tahun 2016 dan 2017.

Jika dilihat konsumsi per komoditasnya, rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari dari ketiga belas kelompok komoditi mengalami kenaikan, namun peningkatan ini sangatlah kecil yaitu sebesar 0,03 persen. Jika melihat sub komoditasnya ada beberapa yang mengalami penurunan. Komoditas tersebut adalah padi-padian, minyak dan lemak, dan bahan minuman. Kontribusi kalori menurut kelompok komoditas menunjukkan adanya perubahan pola pangan penduduk Sumatera Barat. Kelompok padi-padian tetap menjadi penyumbang kalori utama

Gambar 5.4. Konsumsi Energi Per Kapita per Hari Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat, 2016-2017



Sumber: BPS, Susenas 2016 dan 2017

namun mengalami penurunan jumlah kalori pada tahun 2017. Kelompok sayur-sayuran merupakan pertumbuhan kalori yang tertinggi.

Seiring dengan kenaikan rata-rata konsumsi kalori, rata-rata konsumsi protein per kapita juga mengalami kenaikan, yaitu sebesar 2,98 persen. Padi-padian, makanan dan minuman jadi, ikan, daging, kacang-kacangan, serta telur dan susu merupakan kelompok komoditi yang memberikan kontribusi besar dalam konsumsi protein. Terjadi perubahan pola pangan dalam kurun waktu 2016-2017. Perubahan terjadi pada sub komoditas kacang-kacangan dan telur dan susu. Hal ini terjadi karena konsumsi kacang-kacangan mengalami pertumbuhan

Tabel 5.6 Jumlah Konsumsi Kalori dan Konsumsi Protein per Jenis Komoditi di Sumatera Barat Tahun 2016-2017

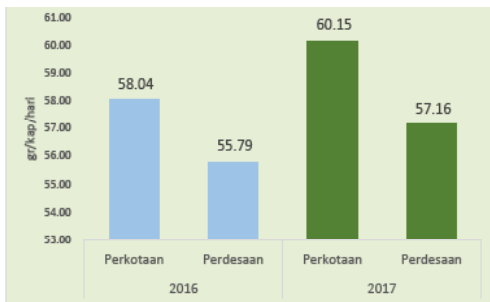
Kelompok Komoditi	Jumlah Kalori (kcal/kapita/hr)		Jumlah Protein (gr/kap/hari)	
	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Padi-padian	959,422	893,915	22,480	20,927
Umbi-umbian	26,399	27,403	0,487	0,447
Ikan	46,771	48,429	7,753	8,101
Daging	55,697	63,357	3,435	4,034
Telur dan susu	55,142	58,966	3,279	3,520
Sayur-sayuran	26,424	42,522	1,724	2,377
Kacang-kacangan	28,518	34,647	3,050	3,584
Buah-buahan	33,133	42,470	0,359	0,432
Minyak dan lemak	365,992	353,517	0,803	0,666
Bahan minuman	94,266	86,770	0,855	0,738
Bumbu-bumbuan	4,166	4,728	0,132	0,147
Konsumsi lainnya	32,604	38,151	0,615	0,681
Makanan & minuman jadi	434,286	468,647	11,737	12,747
Jumlah	2.162,820	2.163,521	56,709	58,400

Sumber: BPS, Susenas 2016 dan 2017

yang tinggi dibandingkan konsumsi telur dan susu sehingga merubah pola kontribusi konsumsi protein. Kelompok padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, serta bahan minuman mengalami penurunan kontribusi protein dibandingkan tahun lalu.

Jika melihat berdasarkan daerah tempat tinggalnya, daerah perkotaan selalu lebih tinggi konsumsi proteinnya dibandingkan daerah perdesaan. Hal ini

Gambar 5.5. Konsumsi Protein Per Kapita per Hari Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat, 2016-2017



Sumber: BPS, Susenas 2016 dan 2017

berbanding kebalikan dengan konsumsi kalori dimana daerah perdesaan yang lebih tinggi. Konsumsi protein mengalami peningkatan baik di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan.



BAB

6

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

<https://sumbar.bps.go.id>

<https://sumbar.bps.go.id>



6. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Berdasarkan UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perumahan didefinisikan sebagai kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Kualitas perumahan akan dipengaruhi oleh kualitas rumah penduduk beserta kawasan permukiman.

6.1. KUALITAS RUMAH TINGGAL

Penilaian kualitas rumah sering dikaitkan dengan konsep rumah sehat. Rumah sehat diartikan secara luas karena konsep sehat itu sendiri mencakup suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial budaya, bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit dan kelemahan (kecacatan). Kementerian Kesehatan mensyaratkan ada empat kondisi yang dipenuhi sehingga rumah dapat dikategorikan sebagai rumah sehat, yaitu:

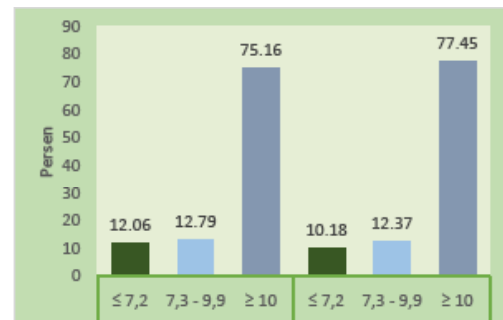
1. Memenuhi kebutuhan psikologis, antara lain privasi yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah, adanya ruangan khusus untuk istirahat (ruang tidur), bagi masing-masing penghuni;
2. Memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran, disamping pencahayaan dan penghawaan yang cukup;
3. Memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena pengaruh luar dan dalam rumah, antara lain persyaratan garis sempadan

jalan, konstruksi bangunan rumah, bahaya kebakaran dan kecelakaan di dalam rumah;

4. Memenuhi kebutuhan fisiologis antara lain pencahayaan, penghawaan dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu.

Selanjutnya terdapat beberapa indikator untuk penilaian rumah sehat yaitu komponen rumah tinggal, sanitasi dan perilaku penghuni. Komponen rumah tinggal terdiri dari langit-langit, dinding, ventilasi/jendela, lantai, kepadatan, pencahayaan serta pemanfaatan pekarangan. Aspek sanitasi mencakup sumber air bersih, jamban, sarana pembuangan limbah dan sampah. Kemudian keberadaan jentik nyamuk, vektor tikus serta kebiasaan cuci tangan merupakan variabel yang digunakan untuk menilai perilaku sehat penghuni rumah.

Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai perkapita (m^2) di Sumatera Barat, 2016-2017



Sumber: BPS, Susenas 2016 dan 2017

Tabel 6.1 menunjukkan bahwa jika dilihat dari luas lantai perkapita, di Sumatera Barat didominasi oleh rumah tangga dengan luas lantai perkapita lebih dari $10 m^2$. Sebanyak 77,45 persen rumah tangga memiliki luas lantai perkapita di golongan ini. Nilai ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Persentase rumah tangga dengan luas lantai perkapita kurang dari $7,2 m^2$ dan antara $7,3$

hingga 9,9 m² mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penambahan luas lantai rumah di Sumatera Barat.

Tabel 6.1 Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Rumah dan Tempat Tinggal Menurut Jenis Wilayah di Sumatera Barat Tahun 2016 dan 2017

Indikator Kualitas Rumah	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lantai terluas bukan tanah (%)	99,53	99,61	99,21	98,54	99,34	98,98
Atap terluas bukan jerami/ijuk/daun/rumbia atau lainnya (%)	99,61	99,80	99,21	99,05	99,39	99,36
Dinding terluas bukan bambu/anyaman bambu atau lainnya (%)	98,26	99,18	97,75	98,60	97,95	98,84
Rata-rata luas lantai per kapita (m ²)	23,15	25,20	20,73	22,14	21,71	23,41

Sumber: BPS, Susenas 2016 dan 2017

Pada tahun 2017 terjadi perubahan kualitas rumah dan tempat tinggal di Sumatera Barat. Persentase lantai terluas bukan tanah menurun dari 99,34 persen di 2016 menjadi 98,98 persen. Jika dilihat dari asal wilayahnya, penurunan ini berasal dari daerah perdesaan. Pada daerah perdesaan pada tahun 2016 persentase lantai terluas bukan tanah sebesar 99,21 persen kemudian menurun di tahun 2017 menjadi 98,54 persen. Hal ini berbeda dengan daerah perkotaan yang mengalami peningkatan menjadi 99,61 persen.

Persentase atap terluas bukan jerami/ijuk/daun/rumbia atau lainnya pun mengalami sedikit penurunan. Penurunan ini pun terjadi pada daerah perdesaan dari sebelumnya 99,21 persen menjadi 99,05 persen. Pada daerah perkotaan justru mengalami peningkatan yaitu dari 99,61 menjadi 99,80 persen.

Indikator kualitas rumah yang mengalami peningkatan adalah dinding terluas bukan bambu/anyaman bambu atau lainnya dan rata-rata luas lantai per kapita. Peningkatan ini terjadi baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Persentase dinding terluas

bukan bambu/anyaman bambu atau lainnya di Sumatera Barat meningkat dari 97,95 persen di tahun 2016 menjadi 98,84 persen

di tahun 2017. Rata-rata luas lantai per kapita di Sumatera Barat mengalami peningkatan dari 21,71 m² menjadi 23,41 m². Angka ini sudah lebih tinggi dari minimal luas lantai per kapita baik

menurut Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Perumahan Rakyat. Masing-masing menyebutkan minimal lantai per kapita untuk hidup sehat adalah 8 meter persegi dan 7,2 meter persegi.

6.2. FASILITAS RUMAH TINGGAL

Persentase rumah tangga yang menggunakan air kemasan, air isi ulang & ledeng di Sumatera Barat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase rumah tangga yang sudah menggunakan fasilitas ini sebesar 51,41 persen di tahun 2017. Di daerah perkotaan rumah tangga yang sudah menggunakan fasilitas ini sebanyak 72,59 persen sedangkan di perdesaan sebesar 36,36 persen di tahun 2017.

Persentase rumah tangga di Sumatera

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2016 dan 2017

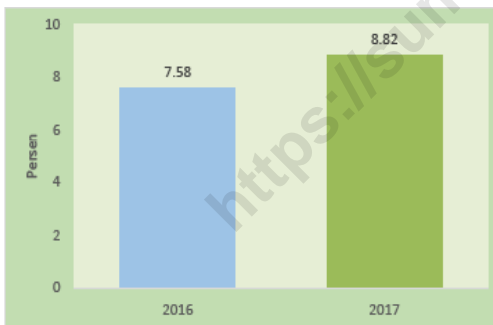
Fasilitas Perumahan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Air Kemasan, air isi ulang & ledeng	69,96	72,59	31,20	36,36	47,02	51,41
Air minum bersih	86,53	86,41	59,97	59,70	70,81	70,79
Jamban Sendiri	77,82	82,25	56,56	61,90	65,23	70,35
Pembuangan Akhir Tinja dengan tangki	72,74	79,38	40,42	58,18	53,61	68,54
Sumber penerangan listrik	98,92	99,37	95,71	96,71	97,03	97,81

Sumber: BPS, Susenas 2016 dan 2017

Barat yang sudah mengakses air minum bersih di tahun 2017 sebesar 70,79 persen. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 70,81 persen. Penurunan ini terjadi di daerah perdesaan dan perkotaan. Persentase rumah tangga yang mengakses air minum bersih di perdesaan pada tahun 2016 sebesar 59,97 persen menjadi 59,70 persen di tahun 2017. Persentase rumah tangga yang mengakses air minum bersih di perkotaan pada tahun 2016 sebesar 86,53 persen menjadi 86,41 persen di tahun 2017.

Persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri, pembuangan akhir tinja dengan tangki, serta memiliki sumber penerangan listrik mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terjadi baik pada daerah perdesaan maupun perkotaan.

Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga Kumuh di Sumatera Barat Tahun 2016 dan 2017



Sumber: BPS, Susenas 2016 dan 2017

Rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga kumuh apabila tidak memiliki akses terhadap air minum layak, tidak memiliki akses terhadap sanitasi layak, luas hunian per kapita $\leq 7,2$ m², dan minimal dua kriteria *durability of housing* terpenuhi. Indikator *durability of housing* mempertimbangkan tiga variabel yaitu jenis atap, jenis dinding, serta jenis lantai.

Sebanyak 8,82 persen rumah tangga di Sumatera Barat pada tahun 2017 dikategorikan sebagai rumah tangga kumuh. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun

sebelumnya yang sebesar 7,58 persen dari rumah tangga yang ada di Sumatera Barat.

Tabel 6.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Indikator Rumah Tangga Kumuh dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2016 dan 2017

Indikator	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Air minum tidak layak	31,17	32,67
Sanitasi tidak layak	46,76	47,23
Luas hunian per kapita $< 7,2$ m ²	12,05	10,18
Jenis atap	0,61	0,64
Jenis dinding	2,05	1,16
Jenis Lantai	0,66	1,02
Rumah tangga kumuh	7,58	8,82

Keterangan: menggunakan metode penghitungan baru
Sumber: BPS, Susenas 2016 dan 2017

Indikator air minum tidak layak meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 31,17 persen menjadi 32,67 persen di tahun 2017. Selain itu, terdapat indikator lain yang meningkat sehingga menyebabkan peningkatan rumah tangga kumuh. Indikator yang meningkat itu yaitu sanitasi tidak layak, jenis atap, dan jenis lantai. Penurunan persentase berarti peningkatan kualitas pada rumah tangga, sehingga menurunkan rumah tangga kumuh. Indikator yang menurun yaitu Luas hunian per kapita $\leq 7,2$ m² dan jenis dinding.

Indikator sanitasi dinilai dari pemakaian jamban sendiri atau bersama, kloset leher angsa atau plengsengan dengan tutup dan tangki sebagai pembuangan akhir. Pada tahun 2017 sebanyak 47,23 persen rumah tangga di Sumatera Barat memiliki sanitasi tidak layak. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 46,76 persen. Rumah memenuhi kriteria *sufficient of living* jika luas hunian perkapita lebih dari 7,2 meter persegi. Dari tabel 6.3, dapat di deskripsikan bahwa pada tahun 2016 masih terdapat 12,05 persen rumah tangga di Sumatera Barat masih tergolong *insufficient of living*. Jumlah ini mengalami penurunan menjadi 10,18 persen di tahun 2017.

6.3. STATUS KEPEMILIKAN RUMAH

Secara umum pada tahun 2017 sebesar 70,58 persen rumah tempat tinggal adalah milik sendiri. Maksudnya adalah rumah atau tempat tinggal tersebut adalah milik dari salah satu anggota rumah tangga yang tinggal di rumah tersebut. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya yang memiliki porsi sebesar 70,58 persen. Rumah dengan status milik sendiri lebih banyak pada daerah perdesaan dibanding perkotaan. Di daerah perdesaan pada tahun 2017 sebanyak 77,61 persen rumah tangga dengan status kepemilikan milik sendiri. Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 80,36 persen. Jika dilihat di daerah perkotaan, rumah tangga dengan status kepemilikan milik sendiri mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 62,05 persen di tahun 2016 menjadi 60,67 persen di tahun 2017.

Tabel 6.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan dan Daerah Tempat Tinggal Di Sumatera Barat Tahun 2016 dan 2017

Status Kepemilikan Rumah	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Milik sendiri	62,05	60,67	80,36	77,61	72,89	70,58
Kontrak/Sewa	20,87	21,68	3,43	3,95	10,53	11,31
Bebas sewa	14,32	15,28	13,88	16,78	14,06	16,16
Dinas, Lainnya	2,76	2,37	2,33	1,66	2,50	1,96

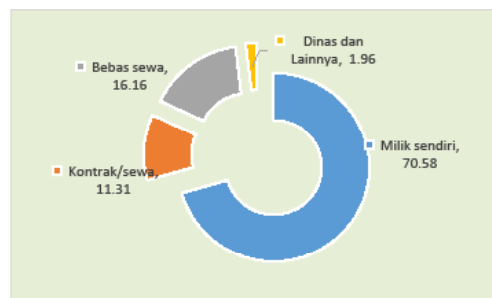
Sumber: BPS, Susenas 2016 dan 2017

Rumah dengan status bebas sewa juga cukup besar proporsinya baik untuk perkotaan maupun perdesaan. Persentase rumah tangga yang memiliki status bebas sewa yaitu 16,16 persen pada tahun 2017. Jumlah ini mengalami peningkatan dari 10,53 persen di tahun 2016. Jika dilihat berdasarkan jenis wilayahnya, persentase rumah tangga yang memiliki status bebas sewa di perkotaan dan perdesaan mengalami peningkatan. Di daerah perkotaan mengalami peningkatan dari 14,32 persen di tahun 2016 menjadi 15,28 persen di tahun berikutnya. Di daerah perdesaan mengalami peningkatan dari 13,88 persen menjadi 16,78

persen di tahun 2017.

Rumah dengan status kontrak atau sewa juga cukup besar. Pada tahun 2017 sebesar 11,31 persen rumah tangga di Sumatera Barat berstatus kontrak atau sewa. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 10,53 persen. Daerah perkotaan lebih banyak rumah tangga yang berstatus kontrak/sewa dibandingkan daerah perdesaan. Pada tahun 2016 rumah tangga di daerah perkotaan dengan status kontrak/sewa sebanyak 20,87 persen. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 21,68 persen di tahun 2017. Sementara untuk daerah perdesaan memiliki jumlah yang lebih kecil dengan persentase sebesar 3,43 persen yang berstatus kontrak/sewa di tahun 2016, meningkat menjadi 3,95 persen di tahun 2017. Hanya rumah tangga yang berstatus kepemilikan dinas dan lainnya yang mengalami penurunan. Yaitu dari 2,50 persen di tahun 2016 menjadi 1,96 persen di tahun 2017.

Gambar 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Status kepemilikan di Sumatera Barat Tahun 2017



Sumber: BPS, Susenas 2017

BAB

7

KEMISKINAN

<https://sumbar.bps.go.id>

<https://sumbar.bps.go.id>



7. KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan suatu masalah multidimensional. Kemiskinan tidak hanya diartikan dari pendapatan yang diperoleh sedikit, namun juga berhubungan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kompleksnya masalah kemiskinan menjadikannya sebagai masalah yang dialami oleh banyak negara, tidak hanya Indonesia. Upaya untuk mengentaskan kemiskinan sudah lama dilakukan oleh pemerintah sejak masa awal kemerdekaan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang layak dan bermartabat.

Salah satu aspek penting untuk mendukung penanggulangan kemiskinan ini adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi hidup mereka. Data kemiskinan yang dihitung BPS berasal dari SUSENAS yang dilakukan oleh BPS setiap tahunnya.

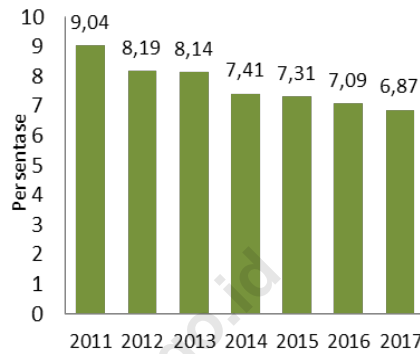
7.1. JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

Konsep atau pendekatan yang digunakan BPS tentang kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Perkembangan persentase kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2011-2017 ditunjukkan pada gambar 7.1. Pada periode tersebut persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat relatif menurun. Tahun 2011 persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat sebesar 9,04 persen, semakin menurun di tahun 2017 hingga 6,87 persen.

Secara absolut jumlah penduduk miskin pada periode 2011-2017 cenderung menurun. Jumlah penduduk miskin di tahun 2011 sebanyak 444.434 jiwa dan terus menurun hingga tahun 2017 sebesar 364.513 jiwa yakni menjadi 364.513 jiwa. Dilihat dari karakteristik daerahnya, sama dengan tahun sebelumnya jumlah penduduk miskin tahun 2017 di daerah perdesaan lebih banyak dibandingkan daerah perkotaan. Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan tahun 2017 sebesar 251.499 jiwa atau 8,10 persen dari total penduduk di daerah perdesaan berkurang sebanyak 51.699 jiwa dibandingkan tahun 2011 dan di daerah perkotaan sebanyak 113.014 jiwa atau 5,14 persen dari seluruh total penduduk di daerah perkotaan, berkurang 28.226 jiwa dari tahun 2011.

Gambar 7.1.
Persentase Penduduk miskin di
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2011 - 2017



Sumber : BPS, Susenas 2011-2017 (kondisi Maret)

Tabel 7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2011-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2011	141 240	303 198	444 438	7,42	10,07	9,04
2012	128 817	279 138	407 955	6,67	9,14	8,19
2013	120 604	290 518	411 121	6,16	9,39	8,14
2014	108 076	271 120	379 196	5,43	8,68	7,41
2015	118 034	261 575	379 609	5,73	8,35	7,31
2016	118 962	252 593	371 555	5,54	8,16	7,09
2017	113 014	251 499	364 513	5,14	8,10	6,87

Sumber : BPS, Susenas 2011-2017 (kondisi Maret)

7.2. PERKEMBANGAN PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI SUMATERA BARAT MENURUT KABUPATEN/KOTA

Dikaji lebih lanjut, jumlah penduduk miskin di provinsi Sumatera Barat paling banyak berada di Kota Padang yang merupakan ibukota provinsi Sumatera Barat dan memiliki jumlah penduduk paling banyak diantara kabupaten/kota lainnya. Jumlah penduduk miskin di Kota

Padang tahun 2017 sebesar 43,75 ribu jiwa atau sekitar 4,74 persen dari jumlah penduduk di Kota Padang. Jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat cenderung turun hingga tahun 2017 ini, apa yang terjadi di Sumatera Barat secara global menggambarkan apa yang terjadi di kabupaten/kotanya. Namun hal ini tidak berlaku untuk Kota Padang yang jumlah penduduk miskinnya mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kota Padang yang merupakan ibu kota provinsi menjadi tujuan bagi pendatang untuk mengadu nasib mencari pekerjaan yang layak, hal ini mungkin menjadi indikasi peningkatan jumlah penduduk miskin di Kota Padang.

Kabupaten/kota yang memiliki persentase penduduk miskin terbanyak atau tingkat kemiskinan terbesar tertinggi di Sumatera Barat adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai yakni sebesar 14,96 persen di tahun 2014; 15,52 persen di tahun 2015; 15,12 persen di tahun 2016 dan 14,67 persen di tahun 2017. Dapat diartikan 14,67 persen penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai di tahun 2017 digolongkan penduduk miskin dan 85,33 persen penduduknya tidak masuk ke dalam golongan penduduk miskin. Tingkat kemiskinan terendah di Sumatera Barat adalah di Kota Sawahlunto yakni sebesar 2,01 persen di tahun 2017.

Tabel 7.2 Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Menurut Tahun 2015-2017

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2015 (5)	2016 (6)	2017 (7)
Kabupaten						
01. Kepulauan Mentawai	13,2	13,1	12,95	15,52	15,12	14,67
02. Pesisir Selatan	38,1	35,9	35,53	8,46	7,92	7,79
03. Kab. Solok	36,4	34,1	33,33	10,00	9,32	9,06
04. Sijunjung	17,5	17,1	16,83	7,87	7,60	7,35
05. Tanah Datar	20,1	19,6	19,27	5,82	5,68	5,56
06. Padang Pariaman	35,9	36,3	34,70	8,86	8,91	8,46
07. Agam	36,1	37,5	36,57	7,58	7,83	7,59
08. Lima Puluh Kota	28,8	28,6	26,93	7,65	7,59	7,15
09. Pasaman	21,9	20,8	20,38	8,14	7,65	7,41
10. Solok Selatan	12,0	11,9	11,89	7,52	7,35	7,21
11. Dharmasraya	15,9	16,2	15,63	7,17	7,16	6,68
12. Pasaman Barat	32,3	30,8	30,85	7,93	7,40	7,26
Kota						
71. Padang	44,4	42,6	43,75	4,93	4,68	4,74
72. Solok	2,7	2,6	2,50	4,12	3,86	3,66
73. Sawahlunto	1,3	1,3	1,23	2,22	2,21	2,01
74. Padang Panjang	3,4	3,4	3,22	6,74	6,75	6,17
75. Bukittinggi	6,5	6,8	6,75	5,36	4,48	5,35
76. Payakumbuh	8,5	8,3	7,72	6,67	6,46	5,88
77. Pariaman	4,6	4,5	4,49	5,42	5,23	5,20

Sumber : BPS, Susenas, 2015 dan 2017 (Keadaan Maret)

7.3. GARIS KEMISKINAN (GK) INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2).

Garis kemiskinan pada dasarnya merupakan standar minimum yang diperlukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk kebutuhan makanan dan non makanan. Data yang digunakan untuk penghitungan kemiskinan di banyak negara berkembang menggunakan data pengeluaran bukan data pendapatan, hal ini karena data pendapatan yang diperoleh cenderung tidak lengkap atau *under estimation* sehingga digunakanlah data pengeluaran sebagai *proxy* dari pendapatan untuk mendefinisikan batas dari standar minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan.

Pengukuran kemiskinan tidak terbatas mengenai jumlah penduduk miskin tapi juga mengevaluasi ketimpangan dan keparahan kemiskinan yang diindikasikan oleh Indeks kedalaman kemiskinan atau *proverty gap index* (P1) dan Indeks keparahan kemiskinan atau *Proverty security index* (P2). Indeks kedalaman kemiskinan (P1) memberikan gambaran seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin relatif terhadap garis kemiskinan (GK). Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan.

Tabel 7.3 Garis Kemiskinan , Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2014-2016

Tahun	Garis Kemiskinan	P1	P2
(1)	(4)		
Maret 2014	349 656	0,940	0,219
Maret 2015	384 277	0,977	0,211
Maret 2016	425 141	1,096	0,242
Maret 2017	453 612	1,00	0,230

Sumber : Susenas 2014-2017 (kondisi Maret)

Indeks keparahan kemiskinan (P2) mengilustrasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Garis kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2014-2017 mengalami peningkatan dari Rp349.656,- pada Maret 2014 menjadi Rp384.277,- pada Maret 2016 menjadi Rp425.141,- dan Rp453.612,- pada Maret 2017.

Pada periode Maret 2014-Maret 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami peningkatan dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 0,940 pada tahun 2014 menjadi 1,00 di tahun 2017. Hal ini mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan, artinya biaya yang dibutuhkan pemerintah untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan semakin besar. Lain halnya dengan Indeks Keparahan Kemiskinan yang mengalami penurunan dari 0,219 di tahun 2014 menjadi 0,23 di tahun 2017.

7.4. KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA MISKIN DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Berbicara mengenai masalah kemiskinan tentu akan lebih menarik jika dikaitkan dengan karakteristik penduduk atau rumah tangga miskin, seperti sosial demografi, pendidikan, ketenagakerjaan, dan perumahan. Dengan mengetahui gambaran karakteristik rumah tangga miskin, diharapkan pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran dalam pengentasan kemiskinan.

KARAKTERISTIK SOSIAL DEMOGRAFI

Karakteristik sosial demografi rumah tangga miskin di Sumatera Barat selama tahun 2015-2017, rata-rata jumlah anggota rumah tangga (ART) mengalami kenaikan di tahun 2017 yaitu sebanyak 5-6 anggota rumah tangga. Persentase wanita yang menjadi kepala rumah tangga (KRT) cenderung meningkat selama kurun waktu tiga tahun. Hal yang melatar belakangi wanita menjadi seorang kepala rumah tangga bisa disebabkan karena wanita ini belum pernah menikah dan mendirikan rumah tangga sendiri atau mengambil alih tanggung jawab kepala keluarga dimana ia menjadi anggota, faktor perceraian, ataupun suami tidak dapat mencari nafkah lagi sehingga istri menggantikan posisinya mencari nafkah.

Indikator rata-rata usia KRT penting untuk melihat produktivitas kerja KRT dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Rata-rata usia KRT rumah tangga miskin menunjukkan penurunan di tahun 2017. Semakin muda umur KRT maka seharusnya upaya yang dilakukan untuk keluar dari gerbang kemiskinan lebih besar. Hal ini bisa menjadi catatan bagi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas KRT keluarga miskin yang mengemban tanggung jawab dalam bidang ekonomi keluarga

Tabel 7.4 Beberapa Karakteristik Demografi Rumah Tangga Miskin di Sumatera Barat, 2015-2017

Karakteristik Demografi	Tahun		
	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Rata-rata Jumlah ART (jiwa)	4,95	5,00	5,09
2. Persentase KRT Wanita (persen)	13,61	17,72	19,53
3. Rata-rata Usia KRT (tahun)	46,48	49,93	47,69

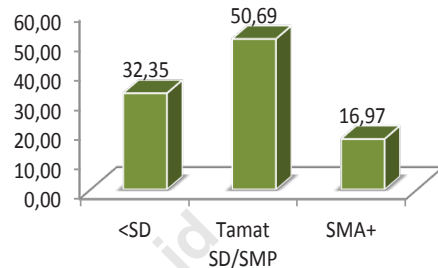
Sumber : BPS, Susenas 2015-2017 (kondisi Maret)

KARAKTERISTIK PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Seseorang dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik

Dinilai mampu menggambarkan potret kemiskinan.

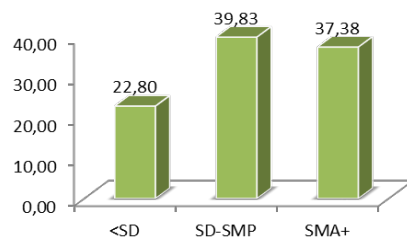
Gambar 7.2a. Persentase Kepala Rumah Tangga miskin Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan di Sumatera Barat, 2017



Sumber : BPS, Susenas 2017 (kondisi Maret)

Persentase KRT miskin yang berpendidikan rendah, bisa dilihat dari persentase KRT yang tidak tamat SD cukup besar yakni 32,35 persen dari penduduk miskin ini tidak tamat SD sedangkan yang menamatkan pendidikan hingga jenjang SMP sebesar 50,69 persen dan hanya 16,97 persen penduduk miskin di tahun 2017 yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang SMA ke atas.

Gambar 7.2b. Persentase Kepala Rumah Tangga Tidak miskin Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan di Sumatera Barat, 2017



Sumber : BPS, Susenas 2017 (kondisi Maret)

Beda halnya dengan penduduk yang tergolong kategori tidak miskin. Kepala rumah tangga yang menempuh pendidikan yang tinggi lebih banyak dibandingkan yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah. Kepala rumah tangga yang berpendidikan SMA ke atas sebesar 37,38 persen di tahun 2017.

Tabel 7.5 Karakteristik Pendidikan Rumah Tangga Miskin di Sumatera Barat, 2015 -2017.

Karakteristik Pendidikan	Tahun		
	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan.			
a. < SD	35,81	32,76	28,54
b. Tamat SD/SMP	47,03	47,64	51,36
c. SMA +	17,16	19,60	20,10
2. Angka Melek Huruf Pendidikan Penduduk Miskin :			
a. 15-24 Tahun	100,00	100,00	98,41
b. 15-55 Tahun	99,16	99,19	99,12
3. Angka Partisipasi Sekolah :			
c. 7-12 Tahun	98,92	99,76	98,75
d. 13-15 Tahun	90,60	91,18	93,57

Sumber : BPS, Susenas 2015-2017

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. APS rumah tangga miskin usia 7-12 tahun terus mengalami penurunan di tahun 2017. APS usia 7-12 tahun sebesar 98,75 persen yang artinya peluang anak usia 7-12 masih bersekolah sebesar 98,75 persen pada tahun 2017, hanya 1,25 persen anak usia 7-12 tahun yang tidak melanjutkan sekolahnya.

KARAKTERISTIK KETENAGAKERJAAN

Kemiskinan erat kaitannya dengan tingkat pendapatan. Penduduk miskin adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan dengan pendapatan

rendah. Lapangan usaha atau sektor yang menjadi sumber penghasilan utama merupakan salah satu indikator kesejahteraan yang mencerminkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Karakteristik pekerjaan seperti lapangan pekerjaan dan status pekerjaan diharapkan mampu menggambarkan perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin. Penduduk usia 15 tahun keatas yang termasuk kategori penduduk miskin yang tidak bekerja meningkat dari tahun 2014-2016, sebesar 40,62 persen penduduk miskin usia 15 tahun ke atas tidak bekerja, sisanya 59,38 persen bekerja. Penduduk miskin usia 15 tahun ke atas ini banyak yang bekerja di sektor informal (45,82 persen), hanya 13,56 persen yang bekerja di sektor formal.

Tabel 7.6 Karakteristik Ketenagakerjaan Rumah Tangga di Sumatera Barat, 2015-2017

Karakteristik Ketenagakerjaan	Tahun		
	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Status Bekerja			
- Tidak Bekerja*)	38,88	40,62	42,41
- Bekerja di Sektor Informal	48,76	45,82	43,42
- Bekerja di Sektor Formal	12,36	13,56	14,17
2. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Sektor Bekerja			
- Tidak Bekerja*)	38,88	40,62	42,41
- Bekerja di Sektor Pertanian	34,43	37,09	35,14
- Bekerja di Sektor Bukan di Sektor Pertanian.	26,69	22,31	22,45

Catatan : *) termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja
Sumber : BPS, Susenas 2015-2017

Selama periode 2015-2017, sektor pertanian masih merupakan sektor yang padat karya dan dilakoni oleh penduduk miskin usia 15 tahun ke atas. Sebesar 35,14 persen dari total penduduk miskin bekerja di sektor pertanian, penduduk yang bekerja sebagai petani ini pada umumnya berpendidikan rendah, kurang inovasi dan memiliki akses permodalan yang terbatas dan 22,45 persen bekerja bukan disektor pertanian. Jumlah

penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja mengalami peningkatan 1,79 persen dibandingkan tahun 2016. Hal ini bisa menjadi perhatian bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk para penduduk miskin untuk mengangkat mereka dari jerat kemiskinan.

KONDISI PERUMAHAN

Penduduk yang sejahtera merupakan penduduk yang tercukupi kebutuhan jasmani dan rohani, termasuk dari segi kesehatan. Rumah yang sehat dan memenuhi syarat kesehatan akan berdampak langsung terhadap kesehatan penghuninya. Oleh sebab itu, karakteristik perumahan seperti luas lantai, jenis lantai, jenis atap, jenis dinding, jenis penerangan, sumber air minum, jenis jamban, dan status kepemilikan rumah menarik untuk dikaitkan dengan rumah tangga miskin.

Sebagian besar rumah tangga miskin tinggal di rumah dengan luas lantai per kapita $\leq 15\text{m}^2$. Bahkan rumah tangga miskin dengan luas lantai per kapita $\leq 8\text{m}^2$ persentasenya masih cukup tinggi, yaitu sekitar 40 persen meskipun trennya menunjukkan fluktuatif dari tahun 2015-2017. Sebaliknya, sebagian besar rumah tangga tidak miskin menempati rumah dengan luas lantai lebih dari 8m^2 . Semakin luas rumah yang ditempati berarti semakin leluasa penghuni rumah untuk melakukan aktivitas di dalamnya.

Secara umum rumah tangga miskin yang menempati rumah dengan lantai tanah mengalami kenaikan di tahun 2017 yakni sebesar 3,68 persen. Dilihat dari jenis atapnya, rumah tangga miskin yang menempati rumah dengan atap jenis seng maupun asbes lebih banyak dibandingkan dengan jenis atap lainnya. Secara umum dapat dilihat bahwasanya jenis atap rumah mayoritas di Provinsi Sumatera Barat adalah seng.

Dilihat dari jenis dinding terluasnya, rumah tangga miskin banyak yang menempati rumah dengan jenis dinding terluasnya adalah tembok dan lainnya, hanya sedikit

rumah tangga miskin yang tinggal di rumah berdinding bambu. rumah tangga miskin yang tinggal di rumah berdinding bambu.

Tabel 7.7 Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Karakteristik Perumahan di Provinsi Sumatera Barat, 2015-2017

Karakteristik Perumahan (1)	Tahun		
	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)
1. Luas Lantai per Kapita			
a. Rumah Tangga Miskin			
- $\leq 8\text{m}^2$	38,53	40,58	40,30
- $8 < \text{Luas Area} < 15\text{m}^2$	39,44	37,93	37,18
- $\geq 15\text{m}^2$	22,03	21,49	22,52
b. Rumah Tangga Tidak Miskin			
- $\leq 8\text{m}^2$	0,46	14,41	12,89
- $8 < \text{Luas Area} \leq 15\text{m}^2$	1,65	27,44	41,63
- $\geq 15\text{m}^2$	97,89	56,15	45,48
2. Jenis Lantai Rumah Tangga Miskin (%)			
a. Bukan Tanah	97,71	98,52	96,32
b. Tanah	2,29	1,48	3,68
3. Jenis Atap Terluas Rumah Tangga Miskin (%)			
a. Genteng, Beton, Sirap	1,52	2,04	0,71
b. Seng, Asbes	96,13	96,19	95,75
c. Ijuk, Rumbia	2,09	1,05	2,17
d. Lainnya	0,27	0,72	1,36
4. Jenis Dinding Terluas (%)			
a. Rumah Tangga Miskin			
- Tembok	50,97	46,25	46,05
- Bambu	0,90	0,87	1,41
- Lainnya	48,13	52,87	52,54
b. Rumah Tangga Tidak Miskin			
- Tembok	72,73	73,09	73,42
- Bambu	0,58	0,42	0,26
- Lainnya	26,69	26,49	26,32
5. Jenis Penerangan Utama (%)			
a. Rumah Tangga Miskin			
- Listrik	88,46	89,31	87,21
- Bukan Listrik	11,54	10,69	12,79
b. Rumah Tangga Tidak Miskin			
- Listrik	96,74	97,54	96,11
- Bukan Listrik	3,26	2,46	3,89
6. Sumber Air Minum (%)			
a. Rumah Tangga Miskin			
- Air Bersih	46,77	47,31	51,26
- Lainnya	55,23	52,69	48,74
b. Rumah Tangga Tidak Miskin			
- Air Bersih	71,10	72,37	69,92
- Lainnya	28,90	27,63	30,08
7. Jenis Jamban			
a. Rumah Tangga Miskin			
- Jamban Sendiri	35,51	36,93	39,51
- Jamban Bersama	41,66	6,00	8,20
- Jamban Umum, Tidak Ada	58,34	57,07	52,29
b. Rumah Tangga Tidak Miskin			
- Jamban Sendiri	66,85	67,11	72,28
- Jamban Bersama	8,77	8,54	10,94
- Jamban Umum, Tidak Ada	24,38	24,35	16,78
8. Status Kepemilikan Rumah			
a. Rumah Tangga Miskin			
- Milik Sendiri	72,78	75,29	69,29
- Kontrak/Sewa	5,88	5,96	6,62
- Lainnya	21,34	18,75	75,91
b. Rumah Tangga Tidak Miskin			
- Milik Sendiri	74,23	72,73	70,66
- Kontrak/Sewa	9,85	10,85	11,61
- Lainnya	15,92	16,42	17,73

Sumber : BPS, Susenas 2015-2017

Jenis penerangan utama rumah penduduk miskin sebagian besar adalah listrik. Secara umum jumlah penduduk miskin yang sudah menggunakan listrik di atas 80 persen. Tidak tampak perbedaan yang signifikan antara rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin disini. Namun jumlah penduduk miskin yang belum menggunakan listrik masih lebih banyak dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin. Begitu juga dengan sumber air minum yang digunakan penduduk miskin. Persentase penduduk miskin yang menggunakan air bersih sebagai sumber air minumnya juga di atas 50 persen. Akses untuk memperoleh sumber air minum bersih masih tergolong mudah diperoleh oleh penduduk miskin di Sumatera Barat karena alamnya yang masih tergolong asri, belum banyak industri yang berkembang yang menyebabkan pencemaran terhadap kualitas air di setiap kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Ketersediaan jamban merupakan salah satu syarat rumah sehat yang penting untuk pola hidup sehat. Menurut jenis jamban, kepemilikan jamban sendiri masih tergolong rendah dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin yaitu 39,51 persen untuk rumah tangga miskin dan 72,28 persen untuk rumah tangga tidak miskin di tahun 2017. Indikasi ini menggambarkan keterbatasan rumah tangga miskin untuk menyediakan fasilitas jamban sendiri sebagai salah satu indikator rumah sehat. Persentase rumah tangga miskin dengan jamban umum atau tidak ada jamban masih tergolong tinggi masih melebihi 50 persen di tahun 2015-2017. Menurut status kepemilikan rumah, secara umum sebagian besar penduduk di Sumatera Barat memiliki rumah sendiri, baik rumah tangga miskin maupun rumah tangga tidak miskin.

Dari gambaran di atas dapat dilihat penduduk miskin di Sumatera Barat masih belum merasakan manfaat dari pembangunan, masih banyak penduduk miskin yang tidak bekerja, adapun yang mempunyai pekerjaan lebih banyak di sektor

pertanian. Penyediaan lapangan pekerjaan di luar sektor pertanian dan perbaikan infrastruktur diharapkan dapat mendorong aktifitas perekonomian bagi penduduk miskin.

BAB

8

SOSIAL LAINNYA

<https://sumbar.bps.go.id>

<https://sumbar.bps.go.id>



8. SOSIAL LAINNYA

Perubahan zaman telah memaksa masyarakat untuk beradaptasi terhadap semua perubahan yang terjadi. Tingkat kebutuhan mulai bergeser, dari kebutuhan sekunder atau tersier menjadi kebutuhan primer seperti berlibur atau berwisata, eksistensi di tengah masyarakat, dan mengakses teknologi informasi dan komunikasi. Pertukaran informasi yang cepat antar daerah menjadi kebutuhan utama yang tidak terhindarkan dalam menunjang keberlangsungan hidup orang banyak.

Perjalanan wisata menurut konsep dari Susenas Kor adalah perjalanan yang dilakukan penduduk dalam wilayah geografis secara sukarela kurang dari 6 bulan dan tidak bertujuan untuk sekolah, bekerja (memperoleh upah/gaji) di tempat yang dituju untuk mengunjungi objek wisata komersial, dan atau menginap di usaha jasa akomodasi, dan atau jarak perjalanan pulang pergi sama atau lebih besar dari 100 km. Perjalanan wisata yang dimaksud bersifat perjalanan bukan rutin untuk berlibur/rekreasi atau olahraga/kesenian. Perjalanan wisata menjadi salah satu indikator yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat cenderung merubah gaya hidup masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan tersier dimana salah satunya adalah melakukan perjalanan.

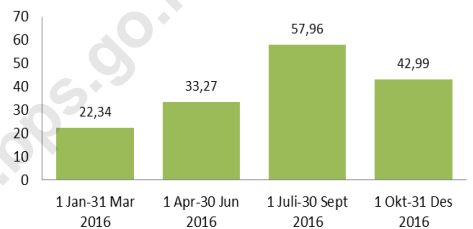
Tabel 8.1 Persentase Penduduk Melakukan Perjalanan di Provinsi Sumatera Barat Menurut Jenis Kelamin, 2016 - 2017

Jenis Kelamin	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	15,96	30,29
Perempuan	17,64	33,18
Laki-laki+Perempuan	16,80	31,75

(Diolah dari Hasil Susenas 2016,2017)

Persentase penduduk yang melakukan perjalanan selama kurun waktu 1 tahun terakhir di Sumatera Barat sebesar 31,75 persen di tahun 2017, hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2016 dan yang melakukan perjalanan ini lebih banyak berjenis kelamin perempuan.

Gambar 8.1 Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan “Wisata” di Sumatera Barat menurut Jenis Kelamin, 2017



Sumber : Susenas 2017

Berdasarkan periode waktu melakukan perjalanan, dari 31,75 persen penduduk Sumatera Barat tahun 2016 yang melakukan perjalanan sebanyak 57,96 persen melakukannya pada bulan Juli-September, hal ini bisa dikarenakan pada periode tersebut merupakan bulan liburan untuk anak usia sekolah dan perguruan tinggi. Selain itu sebesar 42,99 persen penduduk Sumatera Barat melakukan perjalanan akhir tahun yakni di bulan Oktober-Desember.

8.1. AKSES PADA TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Perubahan zaman juga membawa pengaruh pada kebiasaan individu, pola kebutuhan mulai bergeser. Kebutuhan akan perkembangan informasi semakin meningkat. Tak dapat dipungkiri bahwa kemajuan Teknologi, informasi dan Komunikasi (TIK) adalah salah satu kekuatan pendorong globalisasi dan pesatnya pertumbuhan ekonomi bangsa. Kemajuan di bidang

teknologi informasi memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Potensi TIK jika dikembangkan secara optimal dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin banyak penduduk yang memiliki akses TIK dan terus mengikuti kemajuan teknologi, maka dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Tabel 8.2 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet (Termasuk *Facebook*, *Twitter*, *BBM*, *Whatsapp*) dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin, 2016 dan 2017

Jenis Kelamin	Tahun	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Laki-Laki	25,13	30,64
Perempuan	24,99	28,63
Laki-Laki + Perempuan	25,06	29,63

Sumber: Susenas 2016 dan 2017

Persentase penduduk yang melakukan akses internet di tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 4,57 persen dibandingkan tahun 2016. Tujuan penduduk yang melakukan akses internet ini di tahun 2017 paling banyak adalah untuk sosial media baik untuk laki-laki maupun perempuan. Selain sosial media, memperoleh informasi/berita menggunakan internet juga cukup banyak di Sumatera Barat, yakni 65,07 persen. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat masyarakat semakin haus akan informasi atau berita apa yang sedang terjadi diseluruh belahan dunia. Betapa besarnya pengaruh internet di era milenial ini, mulai usia muda hingga usia tua aktif dijejaring sosial mengikuti perkembangan masa kini. Dunia tanpa sekat tanpa batas dewasa ini akan menambah deretan masyarakat yang berpindah menggunakan internet untuk mempermudah dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 8.4 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Tujuan Mengakses Internet dan Jenis Kelamin Tahun 2016

Tujuan Mengakses Internet	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Mendapat Informasi/ Berita	64,73	65,42	65,07
Mengerjakan Tugas Sekolah	30,99	37,59	34,21
Mengirim/ Menerima Email	20,97	24,16	22,53
Sosial Media/Jejaring Sosial	71,82	75,14	73,44
Pembelian/ Penjualan Barang/Jasa	8,41	15,73	11,98
Hiburan	51,14	44,73	48,01
Fasilitas Finansial	3,73	4,17	3,95
Lainnya	9,89	13,41	11,61

Sumber: Susenas 2017

8.2. TINDAK KEJAHATAN

Keamanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesejahteraan rakyat. Rasa aman dari tidak kejahatan menjadi salah satu indikator penting yang mencerminkan rakyat sejahtera dan menjadi salah satu aspek penyusunan Indeks Kebahagiaan Indonesia oleh BPS. Tindak kejahatan adalah segala tindakan yang disengaja atau tidak, telah terjadi atau baru percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan, jiwa, harta benda, kehormatan, dan lainnya serta tindakan tersebut diancam hukuman penjara dan kurungan. Tindak kejahatan atau kriminalitas umumnya terjadi akibat dari kesenjangan sosial dan ekonomi suatu negara, serta bisa bersumber dari kantor politik. Persentase penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan di Sumatera Barat tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun 2016 yakni sebesar 1,02 persen di tahun 2017 dan yang paling sering menjadi korban adalah perempuan dengan persentase sebesar 1,01 persen di tahun 2017. Terkadang jeratan ekonomi membuat orang lain tega melakukan kejahatan.

Tabel 8.5 Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan di Provinsi Sumatera Barat, 2016-2017

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	0,90	0,91	0,89
2017	1,03	1,01	1,02

Sumber: Susenas 2016, 2017

<https://sumbar.bps.go.id>

ISTILAH TEKNIS

Air Minum Bersih

Air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (septic tank) > 10 meter.

Angka Beban Tanggungan

Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100.

Angka Harapan Hidup pada waktu Lahir

Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Angka Kematian Bayi

Probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR)

Banyaknya kelahiran per seribu wanita dari golongan umur 15-49 tahun yang terjadi pada waktu tertentu.

Angka Kelahiran Total

Banyaknya anak yang diperkirakan dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksi dengan anggapan bahwa perilaku kelahirannya mengikuti pola kelahiran tertentu tanpa memperhitungkan angka kelangsungan hidup wanita.

Angka Kelahiran Kasar

Angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran untuk setiap seribu penduduk yang terjadi di suatu daerah pada waktu tertentu.

Angka Kesakitan

Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari.

Angka Melek Huruf

Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

Angka Partisipasi Sekolah

Rasio anak yang sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama.

Angka Putus Sekolah

Proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

Angka Partisipasi Murni

Proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan.

Bekerja

Melakukan kegiatan/pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam terus-menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi). Mereka yang mempunyai pekerjaan tetap tetapi sementara tidak bekerja dianggap sebagai bekerja.

Indeks Gini

Ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Koefisien Gini terletak antara nol yang mencerminkan pemerataan sempurna dan satu yang menggambarkan ketidakmerataan sempurna.

Jumlah Jam Kerja Seluruhnya

Jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja

(tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal diluar pekerjaan).

Angka Melek Huruf

Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

Angka Partisipasi Sekolah

Rasio anak yang sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama.

Angka Putus Sekolah

Proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

Angka Partisipasi Murni

Proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan.

Bekerja

Melakukan kegiatan/pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam terus-menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi). Mereka yang mempunyai pekerjaan tetap tetapi sementara tidak bekerja dianggap sebagai bekerja.

Indeks Gini

Ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Koefisien Gini terletak antara nol yang mencerminkan pemerataan sempurna dan satu yang menggambarkan ketidakmerataan sempurna.

Jumlah Jam Kerja Seluruhnya

Jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal diluar pekerjaan)

Kepadatan Penduduk

Rata-rata banyaknya penduduk per kilometer persegi.

Lapangan Usaha

Bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Kegiatan ini mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam satu digit.

Masih Bersekolah

Sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.

Penduduk Usia Kerja

Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

Penganggur

Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

Pengangguran Terbuka

Mereka yang termasuk pengangguran terbuka adalah :

- a. yang mencari pekerjaan
- b. yang mempersiapkan usaha
- c. yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan
- d. yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Pengeluaran

Pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Pekerja Tidak Dibayar

seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga atau bukan anggota rumah tangga tanpa mendapat gaji.

<https://sumbar.bps.go.id>

SUMBER DATA

Sensus Penduduk

Sensus Penduduk (SP) diselenggarakan tiap 10 tahun untuk mengumpulkan data dasar penduduk dan rumah tangga di seluruh wilayah geografis Indonesia. Sejak era kemerdekaan Indonesia telah menyelenggarakan 6 kali sensus penduduk yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010.

SP menggunakan dua tahap pencacahan; yaitu, pencacahan lengkap dan pencacahan secara sampel. Pencacahan lengkap meliputi semua orang yang berada di wilayah geografis Indonesia, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing (kecuali anggota Korps Diplomatik beserta keluarganya), awak kapal berbendera Indonesia dalam perairan Indonesia, maupun para tuna wisma (gelandangan) yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Pencacahan sampel mencakup semua penduduk yang bertempat tinggal di blok-blok sensus/wilayah pencacahan yang terpilih secara acak dan mencakup sekitar 5 persen rumah tangga.

Survei Sosial Ekonomi Nasional

Kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dimulai pada tahun 1963. Sampai dengan tahun 2017 telah diadakan 47 kali survei. Susenas mengumpulkan data kependudukan, pendidikan, kesehatan/gizi, perumahan/lingkungan hidup, kegiatan sosial budaya, konsumsi dan pendapatan rumah tangga, dan perjalanan. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang umum dikumpulkan melalui pertanyaan kor (pokok) setiap tahun. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang lebih spesifik, dikumpulkan melalui pertanyaan modul setiap tiga tahun. Pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan secara berkala dalam pertanyaan modul adalah:

- (a) Konsumsi/Pengeluaran
- (b) Kesehatan, Perumahan dan Pemukiman
- (c) Sosial Budaya dan Pendidikan.

Sampai tahun 1991 ukuran sampel Susenas beragam dari 25 ribu sampai 100 ribu rumah tangga. Pada tahun 1992, sistem pengumpulan data Susenas diperbaharui, yaitu informasi yang digunakan untuk menyusun Inkesra yang terdapat dalam modul (keterangan yang dikumpulkan tiga tahun sekali) ditarik ke dalam kor (kelompok keterangan yang dikumpulkan tiap tahun). Pada tahun 1993 ukuran sampelnya menjadi sekitar 205 ribu rumah tangga. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah sampel rumah tangga juga meningkat. Pada tahun 2010, jumlah sampel rumah tangga mencapai lebih dari 300 ribu rumah tangga tepatnya sekitar 304.368 rumah tangga. Peningkatan jumlah sampel tersebut akan memungkinkan dilakukan penyajian data sampai tingkat kabupaten/kotamadya. Dengan adanya peningkatan jumlah sampel tersebut BPS melibatkan mitra statistik selain mantri statistik dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan. Mulai tahun 2011 Susenas dilaksanakan secara Triwulan yaitu Triwulan I dilaksanakan bulan Maret, Triwulan II dilaksanakan bulan Juni, Triwulan III dilaksanakan bulan September, dan Triwulan IV dilaksanakan bulan Desember. Setiap Triwulan didistribusikan sampel sebanyak 75.000 rumah tangga.

Susenas 2017 dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia (34 provinsi) dengan ukuran sampel 300.000 rumah tangga yang tersebar di 511 kabupaten/kota di Indonesia. Sampel tidak termasuk rumah tangga yang tinggal dalam blok sensus khusus dan rumah tangga khusus seperti asrama, penjara, dan sejenisnya tetapi rumah tangga yang berada di blok sensus biasa.

Survei Angkatan Kerja Nasional

Kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pertama kali dilakukan pada tahun 1976 untuk melengkapi data kependudukan khususnya ketenagakerjaan. Sejak tahun 1986-1993, pelaksanaan Sakernas dilakukan

4 kali dalam setahun pada bulan-bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Tetapi mulai 1994-2001 pelaksanaannya dilakukan sekali dalam setahun yaitu sekitar bulan Agustus dengan sampel sekitar 65.000 rumah tangga. Selama periode tahun 2002-2004, Sakernas selain dilakukan secara triwulanan juga dilakukan secara tahunan. Pada tahun 2005 - 2017 Sakernas dilakukan semesteran. Untuk tahun 2005, Sakernas dilakukan pada bulan Februari dan November, sedangkan pada tahun 2006 - 2017 dilakukan pada bulan Februari dan Agustus.

Sumber Data Lainnya

Selain dari sensus dan survei, Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat juga menggunakan data yang berasal dari catatan administrasi Kementerian/Instansi Pemerintah di luar BPS sebagai sumber data sekunder yaitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Kesehatan.

DATA

MENCERASKAN BANGSA
Empower The Nation

<https://sumbar.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No 48 Padang 25135

Telp (0751) 442158, 442160

E-mail: sumbar@bps.go.id Website: <http://sumbar.bps.go.id>

